

**KOMUNIKASI POLITIK AHMAD HERYAWAN DAN KEBERHASILAN
KEPEMIMPINANNYA DI JAWA BARAT PERIODE 2013-2018**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh :

Edo Fitri Rinaldi

NPM : 1531040007

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**KOMUNIKASI POLITIK AHMAD HERYAWAN DAN KEBERHASILAN
KEPEMIMPINANNYA DI JAWA BARAT PERIODE 2013-2018**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh :

Edo Fitri Rinaldi

NPM : 1531040007

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Pembimbing II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

KOMUNIKASI POLITIK AHMAD HERYAWAN DAN KEBERHASILAN KEPEMIMPINANNYA DI JAWA BARAT PERIODE 2013-2018

Oleh

EDO FITRI RINALDI

Pada kepemimpinan Ahmad Heryawan pada periode 2013-2018 di Provinsi Jawa Barat terjadi masalah pada birokrat pemerintahannya yang berdampak pada berkurangnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Melihat kondisi ini Ahmad Heryawan melakukan reformasi birokrasi yang tujuannya untuk memperbaiki kerja dari para birokrat pemerintahan provinsi Jawa Barat. Adanya reformasi birokrasi ini diharapkan dapat melakukan komunikasi organisasi yang transparan dalam mengungkapkan kinerja dan tindakan yang akan dilakukan oleh para pemimpin birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, yang digunakan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai adalah Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat 2013-2018, Sumarwan Hadisoemarto Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat, Pegawai Pemerintahan dan Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan komunikasi politik Ahmad Heryawan dalam kepemimpinannya di Jawa Barat periode 2013-2018. Penelitian ini dilakukan untuk berusaha menjelaskan komunikasi politik yang dilakukan Ahmad Heryawan dalam keberhasilan kepemimpinannya di Jawa Barat dan mengetahui keberhasilan kepemimpinan Ahmad Heryawan di Jawa Barat pada periode 2013-2018. Komunikasi politik yang dilakukan Ahmad Heryawan dalam keberhasilan kepemimpinannya di Jawa Barat ialah beliau menggunakan komunikasi non formal, menggunakan kepemimpinan partisipatif, menjadikan acara keagamaan sebagai media komunikasi. Adapun Keberhasilan kepemimpinan Ahmad Heryawan sebagai kepala birokrasi pemerintahan Jawa Barat yaitu dinobatkannya pemerintahan provinsi Jawa Barat masuk dalam birokrasi yang bersih, kecakapan dan profesionalisme para birokrat dapat diandalkan, membangun birokrasi dengan rekam jejak seseorang, dan mendapatkan penghargaan tertinggi Parasamya Purnakarya Nugraha.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**Alamat: JL. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarama I Bandar Lampung 35131 Telp.
(0721) 703289**

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KOMUNIKASI POLITIK AHMAD HERYAWAN DAN
KEBERHASILAN KEPEMIMPINANNYA DI JAWA
BARAT PERIODE 2013-2018**

**Nama : Edo Fitri Rinaldi
NPM : 1531040007
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si.
NIP. 197503172003121003**

Pembimbing II

**Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si.
NIP.197801302011012004**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**Dr. Nadirsah Hawari, M.A
NIP.197406282008011013**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**Alamat: JL. LetKol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp.
(0721) 703289**

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “KOMUNIKASI POLITIK AHMAD HERYAWAN
DAN KEBERHASILAN KEPEMIMPINANNYA DI JAWA BARAT
PERIODE 2013-2018” Disusun oleh ,EDO FITRI RINALDI, NPM :
1531040007, Program Studi : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM, Telah di Ujikan
dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden
Intan pada Hari/Tanggal : Selasa/15 Mei 2019**

TIM PENGUJI

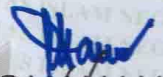
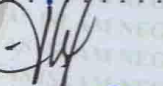

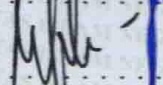
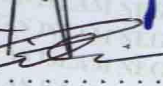
Ketua : Dr. Sudarman, M.Ag

Sekertaris : Angga Natalia, M.I.P

Pembahas Utama : Abdul Qohar, M.Si

Penguji Pendamping I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Penguji Pendamping II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama



Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag

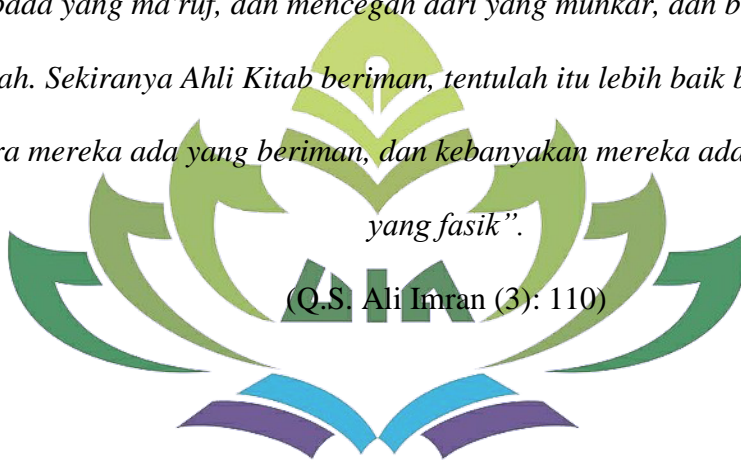
NIP. 195808231993031001

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

(Q.S. Ali Imran (3): 110)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa serta memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menuntut ilmu:

1. Ayahanda Almarhum Mujino dan Ibunda Sa'ariah tercinta, yang membesarkan penulis dengan kesabaran dan penuh kasih sayang, mengasuh, mendidik serta mengarahkan dan selalu mendo'akan agar terwujudnya cita-cita yang mulia ini.
2. Saudara dan saudariku Kakak Eko Muriyanto, Kakak Joni Riswandi, Kakak Tri Setiawan, Kakak Agung Prasetyo, Kakak Febri Ari Sadewo, Adik Indri Indah Rahmawati, Adik Mutia Wulandari yang telah memotivasi dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu.
3. Kakak Iparku Mbak Legi, Mbak Ratna, Mbak Angel, Mbak Yuli serta keponakan-keponakanku Ilham, Alvino, Fikha, Shakila dan Naira.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 20 Februari 1996, dari pasangan Ayahanda Almarhum Mujino dan Ibunda Sa'ariah. Penulis merupakan anak ke enam dari delapan saudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Sukajawa pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 13 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2019

Penulis,

EDO FITRI RINALDI
NPM 1531040007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tiada kata lain yang pantas diucapkan oleh seorang hamba kecuali kalimat puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan berbagai nikmat dan anugerah yang begitu besar kepada kita semua. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan semoga kita mendapat syafaatnya di akhir zaman kelak. Amiiin.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang bersifat moral maupun material dan spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M. Ag**, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak **Dr. Nadirsah Hawari, M. A**, selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu **Dra. Siti Masykuroh, M. Sos. I**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam bidang akademik semasa di bangku kuliah.

4. Bapak **Dr. Ali Abdul Wakhid, M. Si**, dan Ibu **Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si**, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen jurusan Pemikiran Politik Islam dan seluruh pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
6. Bapak Ahmad Heryawan selaku gubernur Jawa Barat dua periode 2008-2013 dan 2013-2018 dan Bapak Sumarwan Hadisoemarto yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dan senang hati menjadi informan dalam penelitian.
7. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Pemikiran Politik Islam Angkatan 2015 yang telah memberikan sumbangsih pemikiran untuk penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk berbagai pengalaman. Ilmu, serta suka duka selama menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
9. Untuk Sahabat sekaligus kelompok belajar saat di bangku kuliah Ani Wijayanti, Aisyah Amini Tanjung, Mutia Herlita Putri, dan Riska Wahyuni serta sahabat seperjuangan sejak di Madrasah Aliyah sampai saat ini, Sari Putri Indah, Sherli Andini dan Muhammad David Brilian yang selalu memberikan motivasi dan saling menyemangati satu sama lain. Terimakasih

untuk canda dan tawa yang telah kita lewati selama ini, kalian adalah yang terbaik.

10. Untuk seluruh adik-adikku angkatan 2016 dan angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih banyak untuk segala dukungan dan motivasinya selama ini, maaf jika saya banyak salah kata dan perbuatan terhadap kalian.

11. Untuk teman-teman KKN kelompok 285 di Desa Waringinsari Barat, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama KKN.

12. Untuk rekan-rekan HIMAPOL Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

13. Untuk keluarga besar Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidik Misi (AMPIBI) UIN Raden Intan Lampung.

Demikianlah semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, Mei 2019

Penulis,

EDO FITRI RINALDI
NPM 1531040007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Komunikasi Politik	17
1. Pengertian Komunikasi Politik	17
2. Unsur-Unsur Komunikasi Politik	19
3. Fungsi Komunikasi Politik	21
B. Kepemimpinan	23
1. Definisi Kepemimpinan	23

2. Gaya Kepemimpinan	25
3. Fungsi Kepemimpinan	29
C. Tinjauan Pustaka	32

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat	34
1. Sejarah Provinsi Jawa Barat	34
2. Keadaan Geografis Provinsi Jawa Barat	36
B. Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat	38
1. Deskripsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.....	38
2. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat	39
C. Profil Ahmad Heryawan.....	42
1. Biografi Ahmad Heryawan.....	42
2. Karir Politik Ahmad Heryawan.....	43

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Komunikasi Politik Ahmad Heryawan Sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	45
1. Komunikasi Politik Kepada Birokrat Pemerintahan	45
2. Komunikasi yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja Birokrat Pemerintahan	58
B. Keberhasilan Kepemimpinan Ahmad Heryawan Di Provinsi Jawa Barat	70
1. Keberhasilan Sebagai Kepala Birokrasi	70
2. Penghargaan Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Rekomendasi	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul adalah sebagai pemberi arah serta dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung didalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini yang berjudul: **“KOMUNIKASI POLITIK AHMAD HERYAWAN DAN KEBERHASILAN KEPEMIMPINANNYA DI JAWA BARAT PERIODE 2013-2018”**.

Sebagai upaya untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul diatas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

Komunikasi politik adalah suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.¹ Komunikasi politik jika diartikan sebagai kegiatan politik pengertiannya ialah komunikasi yang diarahkan

¹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 35

kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu.² Komunikasi politik yang dilakukan Ahmad Heryawan sebagai kepala daerah dan kepala birokrasi sangat mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan yang diraihinya sebagai seorang pemimpin di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Ahmad Heryawan atau yang populer memiliki sapaan Aher adalah seorang politisi muslim di Indonesia. Ia adalah Gubernur Jawa Barat dua periode dari 2008-2013 dan 2013-2018.³

Keberhasilan kepemimpinan adalah terrealisasi atau tercapainya visi seorang pemimpin di dalam kepemimpinannya di sebuah organisasi.⁴ Sebuah keberhasilan kepemimpinan di dalam organisasi atau birokrasi didapat dari mempelajari situasi baru yang dihadapi oleh seorang pemimpin birokrasi dan menyesuaikan teknik, perilaku dan gaya kepemimpinan dengan situasi nyata yang dihadapi.⁵ Menurut Siagian, keberhasilan seorang pemimpin birokrasi dapat dilihat dari semua birokrat birokrasi bekerja dengan tingkat loyalitas dan disiplin yang tinggi, tidak ada konflik antar birokrat serta efisiensi, efektivitas dan produktivitas para birokrat berada pada tingkat

² Gun Gun Heryanto, Shulhan Rumar, *Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 3

³ Ahmad Heryawan, *Membangun Peradaban Mulia*, (Jakarta: Emir, 2016), h. 211

⁴ Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8

⁵ Sondang P Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 14

maksimal.⁶ Adapun keberhasilan kepemimpinan di dalam suatu daerah didapat dari kemampuan pemimpin atau kepala daerah untuk berfikir, bertindak, dan bersikap mengutamakan kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat umum dari pada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran.⁷ Keberhasilan seorang pemimpin daerah dapat dilihat dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Keberhasilan kepemimpinan yang akan dilihat adalah keberhasilan yang diraih Aher dalam kepemimpinannya sebagai kepala birokrasi pemerintahan yang diraih atas dasar komunikasi politik yang dilakukannya kepada para birokrat pemerintahan provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pengertian istilah-istilah yang terdapat di dalam judul, peneliti memaksudkan bahwa judul komunikasi politik Aher dan keberhasilan kepemimpinannya di Jawa Barat periode 2013-2018 adalah proses penyampaian pesan-pesan politik yang dilakukan oleh Aher dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku birokrat pada birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat serta untuk mencapai sebuah keberhasilan kepemimpinan sebagai pemimpin birokrasi pemerintahan yang keberhasilannya tersebut meliputi tingkat loyalitas kerja, kedisiplinan, efisiensi, efektivitas dan produktivitas para birokrat yang ada di dalam birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat pada periode 2013-2018.

⁶ *Ibid.*, h. 19

⁷ Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta: Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 24

B. Alasan Memilih Judul

Terbentuknya judul dalam penelitian ini dikarenakan adanya sebuah masalah sehingga peneliti tergerak untuk melakukan penelitian. Adapun alasan peneliti dalam memilih judul proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Seorang Aher merupakan tokoh politik Islam di Indonesia yang menjabat sebagai gubernur di Provinsi Jawa Barat.
2. Banyaknya penghargaan yang diperoleh Aher sebagai pemimpin birokrasi pemerintah serta penghargaan yang diperoleh provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinannya.
3. Skripsi ini memiliki keterkaitan dengan program studi yang sedang ditempuh peneliti, yaitu Pemikiran Politik Islam.
4. Data-data yang dibutuhkan tersedia baik berupa teori (buku-buku) atau data lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari banyak suku bangsa dan bahasa. Negara yang berasaskan Pancasila serta berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah Negara yang terdiri dari banyak provinsi yang dipimpin oleh putra dan putri terbaik Indonesia dengan membawa cita-cita yang besar untuk memajukan Negara Indonesia.

Kepemimpinan seorang pemimpin menjadi sebagai tolak ukur kesuksesan dalam memimpin sebuah masyarakat Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa dan agama. Masyarakat yang plural perlu dipimpin oleh pemimpin yang memiliki visi besar, cita-cita tinggi, optimistik dan selalu berfikir positif, penuh motivasi, dan melihat masa depan dengan penuh keyakinan. Aktivitas pemimpin antara lain terjelma dalam bentuk memberi perintah, membimbing dan mempengaruhi kelompok kerja atau orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.⁸

Seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik kepada masyarakat yang ingin dipimpinnya. Komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus bisa memengaruhi khalayak untuk bisa percaya terhadap dirinya. Maka perlu adanya komunikasi politik yang baik agar pesan-pesan politik yang sifatnya membangun dapat diterima oleh khalayak.

Islam sebagai agama yang berlandaskan kepada Al- Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, mengajarkan kepada calon pemimpin untuk melakukan komunikasi politik yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al- Hajj ayat 41, yang berbunyi:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِيبٌ

⁸Sudarwan Danim, *Motivasi, Kepemimpinan, dan Efektivitas Kelompok*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 56

*Artinya: (Yaitu) orang-orang yang kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Q.S Al-Hajj : 41).*⁹

Ayat diatas berisi mengenai tugas pemimpin sebagai komunikator politik yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin agar tujuan kepemimpinannya dapat tercapai. Pemimpin yang baik dimata Allah ialah pemimpin yang menjalankan politik dengan berlandaskan amar makruf nahi mungkar, maksudnya dalam penyampain pesan-pesan politiknya harus mengajak khalayak untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.

Era modern saat ini banyak kemunculan pemimpin-pemimpin muslim yang memiliki visi yang besar. Salah satu tokoh pemimpin muslim yang muncul ialah seorang Aher. Ia dipercayai menjadi seorang gubernur di Provinsi Jawa Barat selama dua periode yang diawali dari periode 2008-2013 dan dilanjutkan dengan periode selanjutnya yaitu periode 2013-2018.

Sebagai cendikiawan muslim yang juga terjun ke dunia politik, Aher kerap menjadi sorotan masyarakat luas, karenanya tak jarang pujian dan cibiran kerap mampir di meja kerjanya. Namun, dalam hal kepemimpinan Aher memakai Islam sebagai landasannya dan setiap ia ingin memutuskan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: AlQur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 337

suatu kebijakan ia selalu mengacu pada dogma “*amar makruf nahi mungkar*” seperti yang termaktub dalam Al- Qur’an. Dalam persepsinya, Islam adalah agama yang lengkap mengatur sampai hal-hal mendasar dari makanan, pola perilaku, sampai kepemimpinan. Menurut Aher, Indonesia adalah Negara yang religius. Para pendiri bangsa telah lama meletakkan kedudukan ketuhanan pada sila pertama dalam Pancasila. Sudah sepantasnya upaya untuk membangun karakter bangsa dilakukan dengan menggunakan pendekatan Rabbani.¹⁰

Seorang Aher yang berasal dari partai yang belum pernah memimpin sebuah Provinsi tentunya sangat diluar ekspekstasi bisa memimpin salah satu Provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Provinsi Jawa Barat. Seorang yang berasal dari golongan Ustadz dituntut bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik memimpin sekian kepala yang berbeda-beda dalam bidangnya.¹¹ Tentunya Aher yang notabenenya sebagai politikus muslim yang memegang prinsip ke-Islamannya akan dituntut bisa memegang kekuasaan dengan sebaik mungkin dan dapat menjadi pemimpin yang diteladani oleh bawahannya.

Pada kepemimpinan Aher periode kedua di Jawa Barat terjadi masalah pada birokrasi yang ia pimpin yaitu turunnya kinerja dari birokrat pemerintahan Jawa Barat yang mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan

¹⁰ Ahmad Heryawan, *Membangun Peradaban*, h. 27

¹¹ Indraku, dkk, *Aherlicious: Inspirasi Penuh Hikmah dari Kisah Renyah Ahmad Heryawan*, (Bekasi: Duta Media Tama, 2015), h. 172

publik dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam mengatasi masalah tersebut Aher melakukan reformasi birokrasi yang tujuannya untuk memperbaiki kinerja dari birokrat pemerintahan Jawa Barat. Adanya reformasi birokrasi ini diharapkan dapat melakukan komunikasi organisasi yang transparan dalam mengungkapkan kinerja dan tindakan yang akan dilakukan oleh para pemimpin birokrasi. Sebuah komunikasi yang berjalan baik antara Aher dan para birokrat akan menciptakan keberhasilan di birokrasi pemerintahan Jawa Barat.

Seorang pemimpin yang dapat dikatakan sukses salah satunya bisa membawa kemajuan di daerah yang dipimpinnya. Komunikasi yang dilakukan pun harus dengan cara yang baik agar setiap pesan yang disampaikan kepada khalayak mudah dipahami. Salah satu aspek keberhasilan seorang pemimpin daerah ialah komunikasi yang dilakukannya kepada semua pegawai pemerintahan yang mengisi birokrasi pemerintahan.

Seorang Aher adalah seorang pemimpin yang banyak memiliki inovasi dalam kepemimpinannya di Jawa Barat salah satu contoh inovasi yang diciptakan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat di sektor pemerintahan diantaranya keterpaduan sistem pemerintahan seperti pengadaan barang dan jasa secara elektronik.¹² Kepemimpinan yang disertai dengan inovasi yang tinggi tentunya akan menghasilkan keberhasilan bagi

¹² “Aher Berbagi Keberhasilan Pembangunan Jabar Dengan Mahasiswa Jambi” (Online), tersedia di: <https://jabar.antaranews.com/berita/68495/aher-berbagi-keberhasilan-pembangunan-jabar-dengan-mahasiswa-jambi/> (19 Mei 2018)

Aher di masa kepemimpinannya di Jawa Barat. Sejatinnya keberhasilan seorang pemimpin dapat terwujud ketika ia mendapat dukungan dari bawahannya.

Dari gambaran diataspeneliti tertarik untuk meneliti mengenai komunikasi politik Aher dan keberhasilan yang telah didapat selama kepemimpinannya di Jawa Barat periode 2013-2018.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus membahas mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh Aher dalam keberhasilan kepemimpinannya di Jawa Barat periode 2013-2018.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merasa tertarik meneliti lebih jauh tentang komunikasi politik Aher dan keberhasilan kepemimpinannya di Jawa Barat periode 2013-2018, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi politik yang dilakukan Aher dalam keberhasilan kepemimpinannya di Jawa Barat?
2. Apa saja keberhasilan kepemimpinan Aher di Jawa Barat pada periode 2013-2018?

F. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Komunikasi politik yang dilakukan Aher dalam keberhasilan kepemimpinannya di Jawa Barat.
2. Keberhasilan kepemimpinan Aher di Jawa Barat pada periode 2013-2018.

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini mencakup dua hal, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi Pemikiran Politik Islam dan mempraktikkan teori Komunikasi Politik. Khususnya kajian mengenai keberhasilan kepemimpinan dilihat dari komunikasi politik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi calon pemimpin agar dapat berkomunikasi dengan baik dalam memimpin Provinsi Jawa Barat di masa depan.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Moleong mengutip Bogdan dan Taylormendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹³

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.¹⁴ Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.

3. Sumber Data

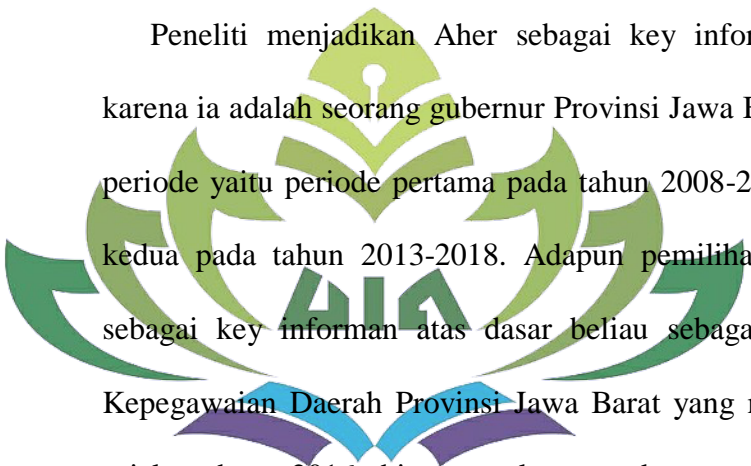
Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 4

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 18

Menurut Fathoni, data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁵ Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari Aher, Kepala Badan Kepegawaian Daerah yaitu Hadisoemarto, Pegawai Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Masyarakat Provinsi Jawa Barat.



Peneliti menjadikan Aher sebagai key informan atas dasar karena ia adalah seorang gubernur Provinsi Jawa Barat selama dua periode yaitu periode pertama pada tahun 2008-2013 dan periode kedua pada tahun 2013-2018. Adapun pemilihan Hadisoemarto sebagai key informan atas dasar beliau sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang masa jabatannya sejak tahun 2016 hingga sekarang dan pemilihan pegawai pemerintahan dan masyarakat provinsi Jawa Barat atas dasar keterlibatan langsung dan pengaruh yang di dapat dari komunikasi politik yang Aher lakukan.

b. Data Sekunder

Menurut Fathoni, data sekunder adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya

¹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38

mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.¹⁶Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang peneliti akan lakukan:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Faisal observasi sebagai suatu alat pengumpulan data, perlu dilakukan secara cermat, jujur atau objektif terfokus pada data yang relevan dan mampu membedakan kategori dari setiap objek pengamatannya.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan melalui media yang membicarakan mengenai keberhasilan kepemimpinan Aher di Jawa Barat periode 2013-2018.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Faisal wawancara adalah semacam angket yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke responden secara lisan.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h. 40

¹⁷ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian*...., h. 137

¹⁸ *Ibid.*, h. 133

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.

Wawancara (*interview*) ditujukan kepada Aher sebagai Gubernur Jawa Barat, Hadisoemarto sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Pegawai Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat mengenai Komunikasi Politik Aher dan keberhasilan kepemimpinannya di Jawa Barat periode 2013-2018.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan dan tetap mempertahankan unsur terpimpin dalam wawancara akan mendekatkan semua maksud dan tujuan sedekat-dekatnya dengan cara efisien. Yaitu wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat mencapai hasil yang tepat dan cermat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, notulen rapat, dan leger legenda.¹⁹

Dokumentasi disini, terkait dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan ataupun menguatkan fakta tertentu, yaitu berupa foto-foto dokumenter yang terkait dengan keberhasilan kepemimpinan Aher di Jawa Barat periode 2013-2018.

5. Teknik Analisis Data Kualitatif

Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁰

Moleong mengutip Bogdan dan Biklen mendefinisikan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

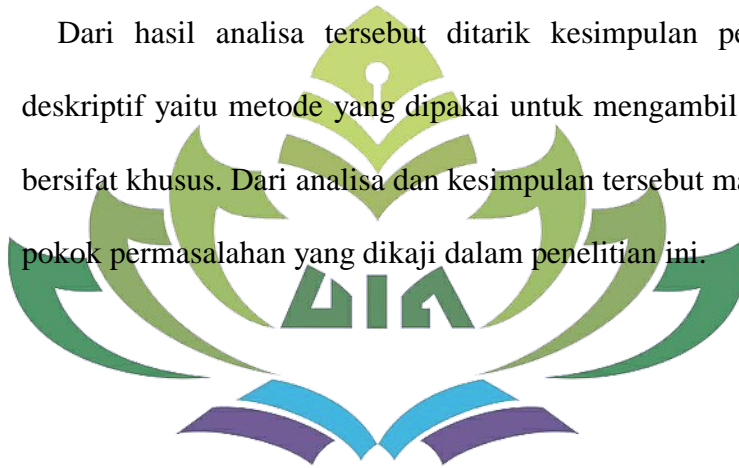
¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....*, h. 280

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Jenis penelitian kualitatif berdasarkan data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Serta dengan menggunakan metode deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu yang bertujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada atau mengidentifikasi masalah.

Dari hasil analisa tersebut ditarik kesimpulan pengertian metode deskriptif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dari analisa dan kesimpulan tersebut maka akan terjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Komunikasi Politik

1. Definisi Komunikasi Politik

Secara etimologi, istilah komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu *communis* yang artinya sama atau *communicare* yang artinya membuat sama.

²¹ *Ibid*, h. 248

Definisi komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan atau saling berbagi informasi, gagasan, dan sikap. Sementara istilah politik berasal dari kata Latin yaitu *politicus* dan bahasa Yunani yaitu *politicos* yang berarti *relating to a citizen*.

Secara terminologi, menurut Rogers dalam Cangara mendefinisikan komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber kepada satu penerima atau lebih atas dasar ingin mengubah tingkah laku.²² Secara general, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Sementara definisi politik secara terminologi adalah aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Sehingga dapat disimpulkan definisi komunikasi politik menurut Heryanto ialah proses penyampaian pesan yang bercirikan politik dari komunikator politik kepada khalayak politik, melalui media tertentu yang bertujuan memengaruhi dengan jalan mengubah dan mempertahankan suatu kepentingan.²³

Graber dalam Cangara mendefinisikan komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh seperti boikot, protes dan unjuk rasa.²⁴ Menurut Rauf dalam Hikmat, bahwasanya komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik karena

²² Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 20

²³ Gun Gun Heryanto, Shulhan Rumar, *Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 2-3

²⁴ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 36

pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik Negara, pemerintah, dan aktivitas komunikator sebagai pelaku kegiatan politik.²⁵ Sebuah komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang kepala kantor tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Wusanto mendefinisikan komunikasi kantor adalah suatu proses penyampaian berita dari satu pihak kepada pihak yang lain (dari seseorang kepada orang lain, dari suatu unit kepada unit lain) yang berlangsung atau terjadi dalam suatu kantor.²⁶ Komunikasi politik yang dilakukan dapat berjalan dengan baik atau tidaknya ditentukan oleh tujuan penyampaian pesan politik yang diinginkan yaitu membuat penerima pesan berperilaku seperti yang diinginkan oleh sang komunikator politik.²⁷

2. Unsur-Unsur Komunikasi Politik

Proses komunikasi politik tentunya sama dengan proses komunikasi dengan umumnya yaitu bertatap muka dan saling menyampaikan pesan, komunikasi politik sebagai *body of knowledge* terdiri atas beberapa unsur, yakni:

a. Komunikator Politik

Komunikator politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga menyangkut lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan

²⁵ Mahi M. Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), h. 36

²⁶ Wusanto, *Etika Komunikasi Kantor*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 25

²⁷ Henry Subiakto, Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 19

demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka yang dapat member informasi tentang hal-hal yang mengundang makna atau bobot politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, MPR, KPU, gubernur, bupati/walikota, DPRD, politisi, fungsionaris partai politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa memengaruhi jalannya pemerintahan.

b. Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita, surat kabar, radio, televise, dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, puisi politik, spanduk/baliho, iklan politik, propaganda, perang urat syaraf (*psywar*), makna logo, warna baju atau bendera, bahasa badan (*body language*), dan semacamnya.

c. Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Contohnya media cetak, media elektronik, media format kecil, dan media luar ruang. Adapun beberapa saluran sebagai unsur komunikasi

politik, yaitu komunikasi kelompok, seperti partai politik (DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC), organisasi profesi, ikatan alumni dan sebagainya. Saluran komunikasi publik, seperti aula, balai desa, pameran, alun-alun, pasar, sekolah atau kampus dan sebagainya. Saluran komunikasi sosial, seperti pesta perkawinan, pesta rakyat, pertunjukan wayang, dan sebagainya.

d. Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (*vote*) kepada partai atau kandidat dalam Pemilihan Umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, mahasiswa yang berhak memilih maupun pelajar atau siswa yang akan memilih setelah cukup usia.

e. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (*vote*) dalam pemilihan umum.²⁸

²⁸ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan....*, h. 37-39

3. Fungsi Komunikasi Politik

Setiap komunikasi politik yang dilakukan pasti memiliki fungsi tersendiri didalam Cagara dijelaskan fungsi komunikasi politik yang dikemukakan oleh McNair serta dikombinasikan dengan fungsi komunikasi yang dibuat oleh Goran Hedebro, maka dapat dijabarkan komunikasi politik sebagai berikut:

- a. Komunikasi politik berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat;
- b. Komunikasi politik berfungsi untuk melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik;
- c. Komunikasi politik berfungsi untuk memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan pendukung partai;
- d. Komunikasi politik berfungsi sebagai platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik;
- e. Komunikasi politik berfungsi untuk mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara;
- f. Komunikasi politik berfungsi sebagai hiburan masyarakat dalam pesta demokrasi dengan menampilkan para juru kampanye, artis, dan para komentator atau pengamat politik;

- g. Komunikasi politik berfungsi untuk memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang mengancam persatuan nasional;
- h. Komunikasi politik berfungsi untuk menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi;
- i. Komunikasi politik berfungsi untuk meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda setting, maupun komentar-komentar politik;
- j. Komunikasi politik berfungsi sebagai watchdog atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya *good governance* yang transparansi dan akuntabilitas.²⁹

B. Kepemimpinan

1. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu topik bahasan yang sedang banyak dibicarakan terutama di dunia perpolitikan, namun dalam melihat konsep kepemimpinan yang sebenarnya perlu dipahami beberapa definisi mengenai kepemimpinan itu sendiri.

²⁹*Ibid*, h. 40-41

Beberapa tokoh mendefinisikan pengertian dari kepemimpinan dalam Tambunan, pertama ialah Terry mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang atau pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain menurut keinginan-keinginannya dalam suatu keadaan tertentu. Adapun seorang Keating memberikan pendapatnya mengenai pengertian kepemimpinan, menurutnya kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, Daft menyatakan bahwasanya kepemimpinan merupakan penggunaan pengaruh untuk memberikan motivasi kepada karyawan untuk tujuan organisasi. Yukl menambahkan pengertian kepemimpinan sebagai proses untuk mempengaruhi orang lain agar memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.³⁰ Cribbin mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh konsensus dan keikatan pada sasaran bersama, melampaui syarat-syarat organisasi, yang dicapai dengan pengalaman sumbangan dan kepuasan di pihak kelompok kerja.³¹

Stogdill dalam Pasolong, mempetakan definisi kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

³⁰ Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 44-45

³¹ James J. Cribbin, *Kepemimpinan Strategi Mengefektifkan Organisasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 1990), h. 12

- a. Kepemimpinan sebagai proses kelompok;
- b. Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat;
- c. Kepemimpinan sebagai seni kesepakatan;
- d. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi;
- e. Kepemimpinan sebagai tindakan perilaku;
- f. Kepemimpinan sebagai bentuk bujukan;
- g. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan;
- h. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan;
- i. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi;
- j. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan; dan
- k. Kepemimpinan sebagai awal struktur.³²

Banyaknya defnisi mengenai kepemimpinan, maka dapat disimpulkan pengertian kepemimpinan adalah cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai demi terwujudnya kepentingan bersama di dalam sebuah organisasi.

2. Gaya-Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin dalam menggerakkan dan mengarahkan para bawahannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang terarah dalam mendukung pencapaian tujuan. Menurut Rivai,

³² Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 5

gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai perilaku dan strategi, yang merupakan hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain dalam setiap pengambilan keputusan serta melaksanakan kegiatan pengendalian.³³ Terdapat beberapa gaya kepemimpinan didalam ilmu kepemimpinan saat ini, yaitu sebagai berikut:

a. Gaya Kepemimpinan Otokratis/Diktatorial (*autocratic leadership*)

Pemimpin yang otokratis menganggap bahwa organisasi adalah miliknya sendiri, mendahulukan tujuan pribadi daripada tujuan organisasi, karyawan dianggap hanya sebagai alat untuk menjalankan organisasinya. Manfaat dari pemimpin autokratik adalah gaya ini lebih memuaskan pemimpin, memungkinkan pengambilan keputusan dengan cepat, memungkinkan pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten, dan menyediakan rasa aman dan keteraturan bagi para pegawai. Kelemahan gaya ini yang utama adalah orang-orang tidak menyukainya, terutama apabila mencapai suatu titik yang menimbulkan rasa takut keputusasaan.

b. Kepemimpinan Militeristis (*militerisme leadership*)

Kepemimpinan ini banyak dijumpai pada organisasi-organisasi militer atau organisasi sistem komando. Pemimpin militeristis memiliki sifat

³³ Veithal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 45

seperti memberikan perintah dalam menggerakkan bawahannya, bangga akan pangkat yang dimiliki, memandang bawahannya sebagai sesuatu yang paling rendah, suka kepada formalitas yang berlebihan dan upacara-upacara resmi dalam setiap kegiatan, sifat yang terakhir ialah memiliki solidaritas kepada kelompok/komunitasnya. Pemimpin tipe ini terlalu menjaga wibawa dan jabatannya, sehingga pemimpin ini ingin selalu dihormati dan disegani oleh para bawahannya, yang mengakibatkan kekakuan dan kurangnya komunikasi dengan para bawahannya.

c. Kepemimpinan Paternalistik (*paternalistic leadership*)

Kepemimpinan paternalistic lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga bawahannya akan diperhatikan secara merata dan diperlakukan seadil mungkin. Pemimpin dalam berhubungan dengan bawahannya bersifat informal, dimana tidak ada batasan tertentu antara pemimpin dan bawahannya. Hubungan yang bersifat informal ini dilandasi oleh pandangan pemimpin bahwa para bawahannya belum dewasa dalam cara berpikir dan berperilaku sehingga diperlukan pembimbingan dan pengarahan secara berkelanjutan dari pemimpinnya.

d. Kepemimpinan Partisipatif (*participative leadership*)

Kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang berusaha untuk melibatkan, mengikutsertakan, memberdayakan semua anggota organisasi di dalam mendukung peran dan tanggung jawab seorang pemimpin. Pemimpin yang partisipatif selalu bekerjasama dengan

anggotanya dan ia akan merasa tidak akan sukses jika tidak melibatkan anggotanya dalam memimpin.

e. Kepemimpinan (*laissez faire*)

Pemimpin yang *Laissez Faire* beranggapan bahwa kehidupan organisasi akan berjalan dengan sendirinya melalui peran, tanggung jawab para anggota organisasi. Pemimpin *Laissez Faire* tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin yang ideal dan efektif bagi suatu organisasi ataupun Negara, sebab akan menyebabkan pemimpin yang bersifat “permisif dan pasif” yaitu pemimpin yang membiarkan para anggota organisasi boleh saja bekerja dan bertindak mengambil keputusan sesuai dengan kemampuan, keyakinan, dan kemauan dalam pekerjaan mereka, serta membiarkan organisasi berjalan sendirinya tanpa banyak berperan aktif dalam menjalankan organisasi.

f. Kepemimpinan Bebas-Kendali (*free-rein leadership*)

Pemimpin ini hanya memainkan peran kecil, serta hanya memikirkan terlebih dahulu akan kebutuhannya sendiri. Jenis kepemimpinan seperti ini kurang efektif di dalam menjalankan organisasi yang menghadapi persaingan.

g. Kepemimpinan Karismatis (*charismatic leadership*)

Kepemimpinan karismatis adalah konsep yang mengasumsikan bahwa karisma adalah suatu karakteristik individual dari pemimpin. Karisma adalah daya tarik interpersonal yang mengilhami dukungan dan

penerimaan. Pemimpin yang karismatis cenderung mengomunikasikan ekspektasi-ekspektasi tinggi menyangkut kinerja bawahan dan menampakkan keyakinan pada bawahan. Pemimpin yang karismatis dapat menjadi pemimpin yang ideal dan efektif, bila pemimpin tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif.

h. Kepemimpinan Demokratis (*democratic leadership*)

Pemimpin demokratis akan fokus pada prinsip efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi dan akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi kepada bawahannya. Seorang pemimpin yang demokratis menyadari bahwa peranan para anggota organisasinya memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sehingga pemimpin tersebut berupaya untuk mengajari dan mengembangkan daya inovasi dan kreatifitas dari para bawahannya.³⁴

3. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan menurut Siagian, sebagai berikut:

a. Pemimpin sebagai penentu arah

Suatu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus optima dalam pemanfaatannya dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Arah yang dimaksud tertuang dalam strategi

³⁴ Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan....*, h. 47-55

dan taktik yang disusun dan dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan. Perumus dan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi tersebut.

Kemampuan para pejabat pimpinan sebagai penentu arah yang hendak ditempuh di masa depan merupakan saham yang teramat penting dalam kehidupan organisasional. Strategi, taktik, teknik, dan keputusan operasional yang tidak tepat akan mengakibatkan organisasi bergerak pada arah yang tidak benar.

b. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi

Pimpinan puncak organisasi yang menjadi wakil dan juru bicara resmi organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak diluar organisasi. Sebagai wakil dan juru bicara resmi organisasi, fungsi pimpinan tidak terbatas pada pemeliharaan hubungan baik saja, tetapi harus membuahkan perolehan dukungan yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan sasarannya.

c. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif

Pemeliharaan hubungan baik ke luar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berbagai kategori keputusan yang telah diambil disampaikan kepada para pelaksana melalui jalur komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan, antara sesama pejabat pimpinan dan antara sesama petugas pelaksana kegiatan operasional

dimungkinkan terjadi dengan serasi berkat terjadinya komunikasi yang efektif. Suatu proses komunikasi dapat dikatakan berlangsung dengan efektif apabila pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator diterima dan diartikan oleh sasaran komunikasi atau penerima pesan.

d. Pemimpin sebagai mediator

Dalam kehidupan organisasional, selalu saja ada situasi konflik yang harus diatasi, baik dalam hubungan ke luar maupun dalam hubungan ke dalam organisasi. Pembahasan tentang pemimpin sebagai mediator difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam satu organisasi, tanpa mengurangi pentingnya situasi konflik yang mungkin timbul dalam hubungan keluar dihadapi dan diatasi. Kemampuan menjalankan peranan selaku mediator yang handal terlihat pula dalam hal terdapat pandangan dalam diri orang-orang dalam organisasi bahwa berbagai kepentingan dalam organisasi sukar atau tidak mungkin dipertemukan. Kemampuan menjalankan fungsi kepemimpinan selaku mediator yang rasional, efektif, objektif, dan netral merupakan salah satu indikator efektivitas kepemimpinan seseorang.

e. Peranan selaku integrator

Integrator sangat diperluksn terutama pada hirarkhi puncak organisasi. Integrator itu adalah pimpinan. Setiap pejabat pimpinan,

terlepas dari hirarki jabatannya dalam organisasi, sesungguhnya adalah integrator. Hanya saja cakupan dan intensitasnya berbeda-beda. Artinya, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hirarki kepemimpinan dalam organisasi, semakin penting pula makna peranan tersebut. Hanya pimpinanlah yang berada diatas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkannya menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik.³⁵

C. Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka peneliti akan memaparkan karya ilmiah yang menjelaskan tentang komunikasi politik dan menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

Skripsi dengan judul **“Komunikasi Politik Melalui Media Massa Pasangan Mochtar Muhammad – Rahmat Effendi (MuRah) Dalam Pilkada Walikota Bekasi Periode 2008-2013”**. Karya Misliyah mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini membahas mengenai media massa yang

³⁵ Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek*...., h. 48-72

digunakan sebagai medium penyampaian pesan serta mengamati komunikasi politik melalui media massa.³⁶

Skripsi dengan judul **“Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Purworejo”**. Karya Basith Bakhtiar Yulfi mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Purworejo yang basis massa Partai Persatuan Pembangunan mayoritas masyarakat muslim.³⁷

Pada skripsi yang peneliti susun tentunya akan berbeda dengan tinjauan pustaka diatas yang telah membahas komunikasi politik melalui media massa dan komunikasi politik partai. Sedangkan pada skripsi ini peneliti lebih melihat mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh Ahmad Heryawan dan keberhasilan kepemimpinan Ahmad Heryawan di Jawa Barat yang disebabkan oleh komunikasi politik yang dilakukan oleh tokoh politik di sebuah pemerintahan.

³⁶Misliyah, “Komunikasi Politik Melalui Media Massa Pasangan Mochtar Muhammad-Rahmat Effendi (MuRah) Dalam Pilkada Walikota Bekasi Periode 2008-2013”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

³⁷Basith Bakhtiar Yulfi, “ Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Purworejo”. (Skripsi Program Sarjana Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).



A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

1. Sejarah Provinsi Jawa Barat

Secara historis pembagian wilayah di Pulau Jawa pada awalnya didasarkan pada pertimbangan militer pada masa Hindia Belanda dalam menghadapi Kasus Perlawanan Diponegoro (1825-1830) di mana Penguasa Hindia Belanda membagi Pulau Jawa menjadi tiga daerah militer, yaitu *Daerah Militer I West Java*, *Daerah Militer II Midden Java*, dan *Daerah Militer III Oost Java*. Namun sebenarnya sejak 1706 wilayah Jawa Barat (kecuali wilayah Kesultanan Banten) sudah dikuasai VOC sebagai ganti kerugian Perang Mataram melawan Trunojoyo. Batas alam yang digunakan

yaitu Sungai Cilosari di Utara dan Sungai Cidonan di Selatan. Batas di bagian Selatan digeser ke sebelah Barat oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) ke Sungai Citanduy.

Pada Tahun 1816 belum dikenal istilah *West Java*. Adalah Alfred Russel Wallace yang menyebut West Java sampai dua kali dalam bukunya yang mendeskripsikan perjalanannya di kep. Nusantara, termasuk Pulau Jawa pada tahun 1861. Pada tahun 1879 terbit pula sebuah buku yang berjudul *West Java* yang ditulis oleh S. Coolsma. Buku tersebut menggambarkan bahwa P Jawa dibagi atas dua bagian yaitu West Java dan Oost Java yang berbatasan di Sungai Cilosari dan S Citanduy. Istilah West Java menjadi resmi setelah pada tahun 1925 dengan dibentuknya suatu kesatuan pemerintahan berupa daerah otonom tingkat provinsi. Pada tahun itu dibentuklah *Provincie West Java* dengan wilayah-wilayah berikut ini: Banten, Batavia, Priangan, dan Cirebon.

Pembagian wilayah administrasi ini dihapuskan oleh kedatangan Balatentara Jepang (1942-1945). Memasuki masa kemerdekaan, wilayah administrasi pemerintahan tingkat provinsi diadakan lagi, yaitu melalui Sidang PPKI 19 Agustus 1945 yang menetapkan NKRI terbagi atas 8 wilayah Provinsi, termasuk Jawa Barat di dalamnya. Pada tahun 1964 wilayah Jawa Barat dikurangi luasnya oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang statusnya setara propinsi. Akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2000, wilayah Jawa Barat kembali dikurangi dengan terbentuknya provinsi Banten.

Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian. Kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan terdiri dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten

Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 592 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

2. Keadaan Geografis Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak diantara $5^{\circ}50'$ – $7^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}48'$ – $108^{\circ}48'$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayahnya ialah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Banten, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda.

Letak Geografis Jawa Barat yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Daerah Jawa Barat bagian utara merupakan dataran rendah sedangkan daerah Selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung yang ada di bagian tengah.

Jawa Barat beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan hari hujan banyak. Iklim yang demikian ditunjang oleh adanya lahan subur yang berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas penggunaan tanahnya untuk pertanian, sedangkan luas wilayah Jawa Barat meliputi $29.275,98 \text{ Km}^2$.

Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah, dengan ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Provinsi Banten, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 34.816,96.³⁸

B. Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1. Deskripsi Pemerintah Jawa Barat

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut sumber daya air, alam dan pemanfaatan lahan, sumber daya hutan, pesisir dan laut serta sumber daya perekonomiannya yang sangat maju di berbagai bidang.

Perkembangan sejarah menunjukan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama di bentuk di wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terdiri dari: 17

³⁸ “Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat” (On-line), tersedia di: <http://jabarprov.go.id/infografis/> (08 Desember 2018)

Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 592 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh 13 gubernur sampai saat ini, berikut ini nama-nama gubernur Jawa Barat beserta masa jabatannya.

NO.	Nama Gubernur	Masa Jabatan
1	M. Sutardjo Kartohadi	1945-1946
2	Mr. Datuk Djamin	1946
3	M. Sewaka	1946-1952
4	R. Muhammad Sanusi Hardjadinata	1952-1956
5	R. Ipik Gandama	1956-1960
6	H. Mashidu	1960-1970
7	Solihin GP	1970-1975
8	H. Aang Kunaefi	1975-1985
9	HR. Yogie SM	1985-1993
10	R. Nuriana	1993-2003
11	H. Danny Setiawan	2003-2008
12	Ahmad Heryawan	2008-2013 & 2013-2018
13	Ridwan Kamil	2018- sekarang

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari ; Sekretariat Daerah (SETDA), 20 Dinas, 15 Badan, 1 Kas Daerah, dan 1 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jakarta.

2. Visi dan Misi Pemerintah Jawa Barat

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

a. Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Maju: sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera: sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Untuk Semua: kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat

b. Misi Pemerintah Jawa Barat

Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu

Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

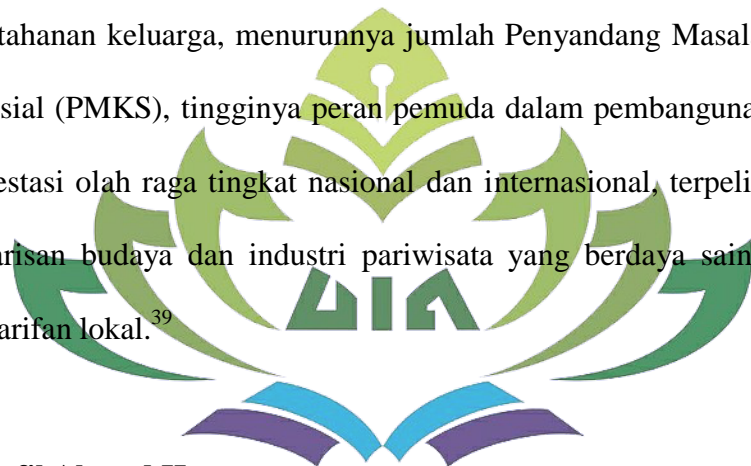
Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya

infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.³⁹



C. Profil Ahmad Heryawan

1. Biografi Ahmad Heryawan (Aher)

Aher adalah seorang politisi muslim Indonesia yang berasal dari keluarga kecil di pinggiran kota Sukabumi. Pria 19 Juni 1966 ini sejak kecil sudah rutin membawa gorengan buatan tetangganya untuk dijual

³⁹ “Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat” (On-line), tersedia di: <http://jabarprov.go.id/index.php/id/1352> (08 Desember 2018)

disepanjang perjalanannya ke sekolah. Ia tidak malu berjualan gorengan untuk membantu kebutuhan sehari-hari keluarganya.⁴⁰

Aher memulai pendidikannya ketika masuk ke Sekolah Dasar Negeri Salaawai 1 Sukabumi pada tahun 1980 dan meneruskan jenjang selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama Sukaraja Sukabumi pada tahun 1983. Selain giat belajar mengenai ilmu umum di sekolah ia juga senang belajar ilmu-ilmu agama Islam. Saat ia duduk di Sekolah Menengah Atas yaitu di SMA Negeri 3 Sukabumi, ia aktif di Rohis (Kerohanian Islam). Di usianya yang masih sangat muda, ia sering menjadi ustadz muda yang diminta berceramah dari satu kampung ke kampung lainnya.⁴¹

Setelah lulus SMA, Aher mendapat beasiswa melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) oleh Kedubes Arab tanpa biaya. Ia lulus dengan menggenggam nilai terbaik. Selepas lulus dari bangku kuliah, ia mulai meniti karir sebagai pengajar dan mubaligh. Ia aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi, antara lain Ma'had Al-Hikmah, Dirosah Islamiyyah Al-Hikmah, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta dan Pusat Studi Islam Al Manar. Ia juga meneruskan pendidikannya di Pasca Sarjana di Ekonomi Sumber Daya dan

⁴⁰ Indraku, dkk, *Aherlicious: Kisah Renyah Penuh Hikmah Ahmad Heryawan*, (Bekasi: Duta Media Tama, 2015), h. 4

⁴¹ Ranting Basah, dkk, *Aherundercover: Menyikap Sisi Lain Ahmad Heryawan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), h. 3

Lingkungan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2014 lalu dilanjutkan kembali kuliah di Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Padjajaran pada tahun 2018. Selain itu juga ia aktif di Persatuan Umat Islam sejak tahun 1991 dan dipercaya untuk menjabat sebagai ketua umum dari tahun 2004 sampai saat ini.⁴²

2. Karir Politik Aher

Karir Aher di dunia politik berawal dengan bergabungnya ia bersama Partai Keadilan Sejahtera. Ia terpilih menjadi salah satu anggota legislative Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1999. Usai pemilu tahun 2004, ia menjabat sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2004-2009. Misi yang ia bawa adalah menciptakan masyarakat yang memiliki dasar pengetahuan untuk melahirkan dunia dengan wajah baru. Pada tahun 2008 ia menjadi Gubernur Jawa Barat dengan wakilnya Dede Yusuf. Pada kepemimpinan ia di Jawa Barat periode 2008-2013, ia memprioritaskan pada pendidikan murah, sejuta lapangan kerja, kesehatan masyarakat, perbaikan ekonomi masyarakat, dan pembenahan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat.

Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2013, Aher menyalonkan diri kembali sebagai calon gubernur dengan wakilnya

⁴² “Ahmad Heryawan Politisi Indonesia” (On-Line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Heryawan (13 Desember 2018)

Deddy Mizwar. Pada periode ini ia kembali mendapatkan amanah dari masyarakat Jawa Barat untuk memimpin Jawa Barat pada periode 2013-2018.



BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Komunikasi Politik Ahmad Heryawan Sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

1. Komunikasi Politik Kepada Birokrat Pemerintahan

Sebuah birokrasi pemerintahan yang berjalan dengan baik tentunya dipimpin oleh seorang kepala birokrasi yang mampu memimpin para birokratnya dengan baik dan mengedepankan kedekatan kepada birokrat pemerintahannya. Setiap kedekatan yang terjalin pastinya didasari oleh komunikasi yang berjalan dengan baik antara pemimpin dan yang dipimpin, komunikasi dijadikan sebagai dasar tercapainya setiap program-program kerja yang telah disusun dan dijalankan.

Sebagai kepala birokrasi pemerintahan akan berhasil jika sudah merealisasikan semua visi misi yang telah dibuat ketika menjabat sebagai kepala birokrasi pemerintahan. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh komunikasi yang baik kepada bawahannya. Suatu birokrasi mensyaratkan adanya suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan yang memungkinkan semua elemen dalam birokrasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang sangat jelas ataupun dengan kata lain setiap elemen

yang berada di dalam birokrasi memiliki satu bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.⁴³

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang memiliki visi dan misi yang tinggi sebagai birokrasi pemerintahan tentunya harus dipimpin oleh kepala birokrasi yang inovasi dan memiliki kinerja yang mengedepankan keberhasilan bersama bukan untuk keberhasilan pribadi ia sebagai kepala birokrasi. Seorang pemimpin yang inovasi tersebut ada pada diri Aher yang menjabat sebagai gubernur Jawa Barat selama dua periode yaitu pada periode pertama tahun 2008-2013 dan diteruskan dengan periode kedua tahun 2013-2018. Kepemimpinan Aher cukup membawa perubahan dan keberhasilan di birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima oleh pemerintahan provinsi Jawa Barat. Tentunya semua itu didasari oleh komunikasi yang dilakukan oleh Aher kepada birokrat pemerintahan pada masa kepemimpinannya di Jawa Barat.

Sebagai seorang kepala birokrasi pemerintahan Aher harus bisa mengajak para birokrat pemerintahannya bekerja sama dalam mencapai visi misinya sebagai seorang gubernur. Setidaknya komunikasi yang dilakukan harus bisa mudah dipahami oleh para birokrat dan terjalin hubungan harmonis di birokrasi pemerintahan Jawa Barat.

⁴³ Syaiful Rohim, *Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam dan Aplikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 124

Komunikasi politik yang dilakukan Aher tentunya dapat dilihat dari beberapa indikator yang bisa menjelaskan mengenai komunikasi yang dilakukannya sebagai kepala birokrasi pemerintahan, yaitu dapat dilihat dari ia sebagai komunikator politik, mengenai pesan politik yang ia sampaikan kepada para birokrat, media yang ia gunakan pada saat penyampaian pesan-pesan politiknya, sasaran politiknya yaitu birokrat yang berada di birokrasi pemerintahan yang ia pimpin, dan efek yang terjadi setelah komunikasi politik yang ia lakukan.

a. Aher Sebagai Komunikator Politik

Seorang Aher sebagai kepala birokrasi harus bisa menjalin komunikasi yang baik karena setiap pekerjaan yang ingin dilakukan tentunya harus diawali dengan komunikasi yang lancar. Komunikator politik adalah mereka yang dapat member informasi tentang hal-hal yang mengundang makna atau bobot politik. Aher menyampaikan komunikasi yang ia lakukan ialah “membangun relasi, membangun hubungan dengan para birokrat dengan baik sehingga para birokrat senang untuk melaksanakan visi misi gubernur yang ada di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD). Modal komunikasi yang dilakukan ialah dengancara silaturahmi dengan para birokrat menjadi modal untuk membangun komunikasi dengan baik. Komunikasi masuk dalam dua hal yaitu keinginan kita dipahami oleh birokrat dan birokrat yang melaksanakan dengan baik, itulah awal komunikasi yang dilakukan

kepada birokrat. Tentu diawali dengan pengenalan dengan mereka, menyelami pikiran mereka, menyelami program-program mereka, lalu saling memahami antara pemimpin birokrat dengan para birokrat”.⁴⁴

Sebuah komunikasi yang dilakukan Aher diawali dengan membangun relasi tentunya akan memudahkan ia dalam setiap kinerja yang akan dilakukan sebagai kepala birokrasi. Adanya hubungan yang baik tentunya harus ada rasa saling memahami yang tinggi antara ia dan para birokrat dengan itu setiap program yang disusun akan terealisasi sesuai yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Penting bagi setiap pemimpin menjalin hubungan yang harmonis kepada bawahannya karena jika hubungan pemimpin dan bawahannya tidak harmonis akan mengakibatkan perpecahan didalam birokrasi dan akhirnya setiap program yang ada tidak terealisasi.

Sebagai kepala birokrasi Aher memiliki prinsip untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan ia di birokrasi tidak ingin adanya perselisihan dengan para birokrat karena dengan banyaknya teman akan memudahkan ia memberikan gagasan yang ingin disusun dalam program kerja. Menjadikan para birokrat sebagai teman berfikir, teman bekerja, dan tidak ingin menjadikan atasan dan bawahan menjadi kaku karena adanya atasan dan bawahan dalam sebuah

⁴⁴ Ahmad Heryawan, wawancara dengan penulis, Geulis Boutique Hotel dan Café, Bandung, 27 November 2018.

birokrasi pemerintahan hanya dilihat dari besar dan kecilnya tanggung jawab sebagai elemen di birokrasi pemerintahan. Konsep komunikasi non formal diterapkan oleh Aher demi kedekatannya dengan para birokrat dan akan mengakibatkan segala yang dilakukan para birokrat ada pada lingkup pemikiran Aher secara keseluruhan. Selain itu agar program kerja berjalan dengan baik Aher sebagai kepala birokrasi banyak membaca, mendengar, dan menelaah permasalahan yang ada agar semakin berjalannya pemerintahan Aher semakin mengerti program-program yang diinginkan dan para birokrat menjalankan program dengan baik.

Seorang Aher yang juga sebagai seorang mubaligh mengedepankan silaturahmi dalam komunikasinya kepada para birokrat, silaturahmi dijadikan sebagai modal komunikasi yang terbaik karena dengan adanya silaturahmi antara kepala birokrasi dan para birokrat akan menciptakan rasa kekeluargaan didalam birokrasi pemerintahan. Selain alasan tersebut silaturahmi merupakan ajaran Islam yang harus dipraktikan oleh seluruh umat Islam, dengan silaturahmi akan menambah relasi dengan para birokrat dan tidak ada batasan antara pemimpin dan yang dipimpin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hadisoemarto Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai komunikasi yang dilakukan Aher, ia mengatakan bahwasanya “beliau (Aher) menggunakan

komunikasi non formal yaitu komunikasi yang sifatnya kekeluargaan untuk membangun integritas diantara birokrat”⁴⁵.

Komunikasi seorang kepala birokrasi pemerintahan yang sifatnya tidak formal akan menciptakan nyaman bekerja bagi para birokrat karena dengan itu para birokrat bisa merasakan kekeluargaan yang kuat antara pemimpin dan bawahannya serta adanya hubungan saling memotivasi antar birokrat pengisi birokrasi pemerintahan. Para birokrat dapat menyampaikan setiap permasalahan yang ada di kalangan internal birokrasi baik berupa kinerja maupun program-program kerja yang masih kurang maksimal dalam proses merealisasikannya. Komunikasi nonformal seperti inilah yang harus diciptakan dan dijaga di dalam sebuah birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan komunikasi yang dilakukan Aher seperti itu membawa ia mudah memberikan arahan kepada para birokrat karena dalam proses komunikasi setiap perintah kepala birokrasi harus dipahami oleh para birokrat dan para birokrat melaksanakan perintah dengan baik. Komunikasi seperti itulah yang digunakan seorang Aher sebagai kepala birokrasi.

⁴⁵ Sumarwan Hadisoemarto, wawancara dengan penulis, Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung, 27 November 2018.

b. Pesan Komunikasi Politik Aher

Setiap komunikasi politik tentunya dipengaruhi oleh pesan politik yang disampaikan. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Mengenai pesan politik yang disampaikan Aher tentunya memiliki ciri khas tersendiri dalam kepemimpinannya sebagai kepala birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat. Menurut Aher, “Sebagai seorang kepala pemerintahan sekaligus seorang mubaligh atau da’i dalam menyampaikan pesan kepada pegawai memakai Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar, fungsinya sebagai penguatan nilai-nilai dan kinerja yang ingin dicapai”.⁴⁶

Pesan politik yang berdasar pada Al Qur’an dan Hadis tentunya berisi mengenai kebaikan-kebaikan yang diajarkan di dalam agama Islam. Setiap para birokrat mendapatkan arahan dari Aher yang mengedepankan dakwah dalam kepemimpinannya akan menjadi motivasi tersendiri untuk menjalankan kinerja dengan maksimal karena penguatan nilai-nilai keagamaan yang diberikan Aher membuat para birokrat tidak ingin memberikan kinerja yang tidak maksimal.

⁴⁶ Ahmad Heryawan, wawancara dengan penulis, Geulis Boutique Hotel dan Café, Bandung, 27 November 2018.

Keuntungan yang didapatkan oleh Aher sebagai kepala birokrasi dengan menaruh nilai-nilai keagamaan di dalam kepemimpinannya ialah memberikan suntikan motivasi para birokrat untuk menjauhi dari kinerja yang dilarang oleh ajaran agama. Seperti bermalas-malasan, berbuat curang, tidak disiplin dalam bekerja dan lain sebagainya. Sehingga segala bentuk kesalahan dalam kinerja dapat diminimalisir dan yang ada ialah ketercapaian kinerja pada setiap program kerja yang telah disusun dan ingin dicapai pada birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebuah kepemimpinan seorang pemimpin jika dibarengi dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat tentunya menjadi sebuah ciri khas tersendiri karena dalam memimpin setiap kebijakan yang akan dibuat melihat dari baik dan buruknya ataupun dampak yang akan didapatkan setelah kebijakan itu dijalankan. Inilah yang menjadikan sebuah konsep bahwasanya hubungan antara kepemimpinan dan agama itu saling bersinergi untuk menciptakan keharmonisan di dalam birokrasi.

c. Media Komunikasi Politik Aher

Setiap pesan komunikasi politik yang dilakukan tentunya dapat tersampaikan dengan baik ketika menggunakan perantara penyampainya yaitu media politik dalam komunikasi politik. Sebuah media dijadikan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan publik dan menciptakan kohesivitas dukungan, lembaga pemerintah, DPR, maupun lembaga

yudikatif.⁴⁷ Media politik merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Pengaruh dari media sangat besar karena dapat menentukan diterima atau tidak diterimanya pesan-pesan politika yang disampaikan oleh para komunikator politik.

Sebagai kepala birokrasi pemerintahan Aher menekankan bahwa media sangat dibutuhkan dalam kepemimpinannya di pemerintahan provinsi Jawa Barat. Sebagaimana ia mengatakan bahwa “Media politik berkewajiban memunculkan, menginformasikan hasil kinerja lewat media dan komunikasi media harus baik, harus bersahabat dengan wartawan, pihak-pihak media mainstream dan nonmainstream maupun media sosial dan elektronik supaya tidak ada hal-hal yang menjadi persoalan yang ada hasil kinerja yang bagus dan diberitakan apa adanya”.⁴⁸

Pada masa jabatannya di pemerintahan provinsi Jawa Barat sebagai seorang gubernur tentunya Aher menjadi sorotan publik khususnya masyarakat provinsi Jawa Barat atas kinerja yang dilakukannya. Pemberian informasi kepada masyarakat terhadap sebuah kinerja para birokrat sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi Jawa Barat agar terciptanya birokrasi yang transparan. Media politik yang bertugas untuk memberikan

⁴⁷Gun Gun Heryanto. *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media Di Panggung Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 25

⁴⁸Ahmad Heryawan, wawancara dengan penulis, Geulis Boutique Hotel dan Café, Bandung, 27 November 2018.

informasi harus bisa memunculkan hasil kinerja yang telah dijalankan, informasi yang disajikan harus sebuah fakta yang sumbernya dapat dipercaya.

Seorang Aher selalu mengedepankan kedekatan kepada semua pihak yang terlibat dalam kepemimpinannya sebagai seorang gubernur. Penggunaan media dalam kepemimpinannya ia selalu menjaga hubungan baik kepada pihak-pihak media seperti media mainstream, non mainstream, media sosial, dan media elektronik. Kedekatan yang terjalin ini nantinya akan menghindari munculnya pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya tidak sesuai berdasarkan kenyataan dan dapat menjadi bukti terhadap kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintahan provinsi Jawa Barat. Tanpa adanya media akan sangat sulit masyarakat mengetahui kinerja para birokrat serta adanya media ini akan membuat para birokrat menunjukkan kinerja terbaiknya demi menjaga nama baik birokrasi pemerintahan.

Sebagai seorang pemimpin daerah dan kepala birokrasi yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan sama halnya dengan penggunaan media penyampaian pesan politiknya. Acara keagamaan dijadikannya sebagai media komunikasi kepada para birokrat dan masyarakat, seperti yang diutarakan oleh Hadisoemarto Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat “beliau (Aher) mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian yang dijadikan untuk membicarakan permasalahan dan

membangun kebersamaan sehingga tujuan suatu program diketahui oleh seluruh para birokrat atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dimohon dapat memberikan kontribusi apa yang diinginkan karena sebuah program Jawa Barat milik seluruh aparat pemerintahan provinsi Jawa Barat”.⁴⁹

Acara keagamaan yang dijadikan media menyampaikan pesan politiknya seperti acara pengajian yang dilakukan oleh Aher di birokrasi pemerintahan dijadikannya sebagai alat untuk membangun kedekatan dengan para birokrat dan adanya diskusi mengenai program kerja yang ingin dijalankan. Sebuah acara pengajian dijadikan media dalam kepemimpinan Aher tentunya akan mempererat silaturahmi antar elemen birokrasi serta tidak ada persinggungan di dalam birokrasi. Hal ini menjadi bukti bahwasanya dalam menyusun program kerja bukannya ketika sifatnya formal dalam lingkup birokrasi namun penyusunan program kerja yang efektif menurut Aher ialah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non formal seperti acara pengajian yang dilakukan dengan para birokrat pemerintahan provinsi Jawa Barat.

Kegiatan keagamaan yang dijadikan sebagai media politik harus bisa terus dijaga dan dicontoh oleh birokrasi pemerintahan provinsi lainnya yang ada di Indonesia karena selain dapat mempererat ukhuwah Islamiyah

⁴⁹Sumarwan Hadisoemarto, wawancara dengan penulis, Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung, 27 November 2018.

antar elemen birokrasi, kegiatan ini juga dapat menjadi awal penyusunan program kerja yang semua elemen ikut merumuskannya dengan tujuan bersama yang ingin dicapai.

d. Sasaran Komunikasi Politik Aher

Jaringan komunikasi politik di sebuah birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Aher sebagai kepala birokrasi memiliki sasaran komunikasi politik ialah para birokrat pemerintahan agar dapat melaksanakan program kerja yang telah disusun. Para birokrat yang berada di dalam birokrasi tentunya harus bisa bekerja sama dengan kepala birokrasi untuk merealisasikan program kerja yang telah ada, namun dalam sebuah kenyataannya masih adanya birokrat yang kontra terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh Aher. Sebuah pro dan kontra di dalam sebuah kebijakan adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan dalam proses berlangsungnya sebuah pemerintahan.

Pada masa kepemimpinan Aher sebagai kepala birokrasi hampir setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Aher tidak ada kontranya dikarenakan birokrat tidak berani memunculkan dirinya jika tidak setuju terhadap sebuah kebijakan tertentu. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Aher ada yang tidak setuju karena adanya kepentingan yang mendasari tidak setujunya terhadap kebijakan tersebut. Terdapat sebuah kebijakan yang tidak ada kontra dari para birokrasi yaitu kebijakan kenaikan tunjangan kepada para birokrat, kebijakan ini sangat didukung oleh para birokrat

karena dianggap sebagai bentuk apresiasi dari kepala birokrasi terhadap kinerja yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dari visi misi gubernur sebagai kepala birokrasi.

e. Efek Komunikasi Politik Aher

Berlangsungnya komunikasi di dalam sebuah birokrasi pemerintahan akan memiliki efek terhadap komunikasi yang dilakukan tersebut. Efek komunikasi bisa menghasilkan hal yang positif dalam sebuah kinerja di birokrasi yang terdiri dari kepala birokrasi dan para birokrat. Pimpinan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam birokrasi dapat memberikan kontribusi dalam membangkitkan iklim komunikasi yang baik dalam biokrasinya.⁵⁰ Komunikasi sebagai seorang kepala birokrasi kepada para birokrat tentunya diharapkan akan mendapatkan efek yang membuat kinerja para birokrat lebih baik. Proses komunikasi yang telah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi para birokrat menjadikan komunikasi sebagai alat untuk menyatukan setiap elemen di dalam birokrasi pemerintahan.

Seorang Aher sebagai kepala birokrasi sekaligus komunikator politik menjadi komunikasi sebagai sesuatu yang mendasar harus diawali agar terjalin hubungan yang baik dengan para birokratnya. Kepemimpinan yang berdasarkan kedekatan bersama para birokrat menjadi ia sebagai salah satu pemimpin yang berhasil di Indonesia.

⁵⁰ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 91

Efek komunikasi politik yang dilakukan Aher dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintahan provinsi Jawa Barat yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.⁵¹

2. Komunikasi yang Dilakukan Aher Untuk Meningkatkan Kinerja Birokrat Pemerintahan

Keberhasilan Aher memimpin birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat dapat dicapainya karena adanya pendekatan yang ia lakukan kepada para birokrasi. Tentunya ia memiliki pendekatan tersendiri di dalam kepemimpinannya, sebuah pendekatan dalam kepemimpinan seorang kepala birokrasi sangat penting karena dengan adanya pendekatan akan menyatukan kinerja untuk keberhasilan bersama. Sebagaimana yang diutarakan oleh Aher mengenai pendekatannya yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan manusiawi, rapat dibuat tidak terlalu formal, pendekatan segala cara, biasa dilakukan rapat *by phone*, dengan cara itu segala urusan atau rapat bisa terselesaikan”.⁵²

⁵¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat 2016-2020*, (Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2016), h. II-1

⁵² Ahmad Heryawan, wawancara dengan penulis, Geulis Boutique Hotel dan Café, Bandung, 27 November 2018.

Seorang Aher yang menggunakan kepemimpinan partisipatif yaitu kepemimpinan yang berusaha untuk melibatkan, mengikutsertakan, memberdayakan semua anggota organisasi di dalam mendukung peran dan tanggung jawab seorang pemimpin. Pemimpin yang partisipatif selalu bekerjasama dengan anggotanya dan ia akan merasa tidak akan sukses jika tidak melibatkan anggotanya dalam memimpin.

Sebagai seorang pemimpin partisipatif Aher menggunakan pendekatan manusiawi yang dilakukan pada masa kepemimpinannya karena pendekatan seperti ini akan memudahkan kinerjanya sebagai kepala birokrasi. Melalui pendekatan ini menjadikan hubungan antara Aher dan para birokrat tetap baik. Saling memahami dalam bekerja sangat diperlukan karena dengan adanya rasa saling memahami akan menumbuhkan tali yang erat di dalam birokrasi. Aplikasi dari pendekatan manusiawi yang dilakukan Aher ialah dengan mengadakan rapat yang tidak terlalu formal agar para birokrat leluasa dalam menyampaikan aspirasinya ketika rapat.

Selain pendekatan manusiawi yang dilakukan oleh Aher, ia juga dalam beberapa urusan yang mendesak ia menggunakan pendekatan segala acara kepada para birokrat. Pendekatan ini dilakukan atas dasar situasi yang tidak memungkinkan pertemuan langsung antara Aher dan para birokrat. Berbagai urusan diluar birokrasi yang ada pada Aher membuatnya harus melakukan pendekatan seperti ini agar semua urusan yang ada di

dalam birokrasi bisa diselesaikan. Aplikasi dari pendekatan segala cara yang dilakukan ialah rapat *by phone* kepada para birokrat, maksudnya ialah seorang Aher yang tidak dapat hadir langsung pada rapat akan menelepon birokrat untuk menanyakan mengenai masalah yang sedang di bahas. Saling berkomunikasi menggunakan telepon ini dijadikan solusi terbaik ketika banyaknya urusan yang dikerjakan Aher diluar birokrasi. Hasil dari pendekatan segala cara ini ialah terselesaikannya segala urusan yang ada. Menurut Aher bukti berhasilnya pendekatan yang ia lakukan ini adalah “Semua program kerja diatas 90% terealisasi dan pada tahun 2017 provinsi Jawa Barat menyerap anggaran 96% tertinggi di Indonesia”.⁵³

Bukti inilah yang tidak dipungkiri bahwasanya pendekatan yang dilakukan seorang pemimpin dalam kepemimpinan mempengaruhi keberhasilan kepemimpinannya.

Pada kepemimpinan Aher di birokrasi pemerintahan dengan kondisi para birokrat, terdapat beberapa bidang yang harus diperbaiki dan harus terselesaikan dengan cepat. Menurut yang dikemukakan Aher “Bidang yang harus diperbaiki seperti profesionalisme, disiplin, dedikasi, motivasi, loyalitas harus dibangun dengan baik”.⁵⁴

⁵³ Ahmad Heryawan, wawancara dengan penulis, Geulis Boutique Hotel dan Café, Bandung, 27 November 2018.

⁵⁴ Ahmad Heryawan, wawancara dengan penulis, Geulis Boutique Hotel dan Café, Bandung, 27 November 2018.

Keadaan birokrat yang mengisi birokrasi pemerintahan yang memiliki pemikiran dan kepentingan yang berbeda-beda tentunya harus tetap menjaga profesionalisme dalam bekerja. Setiap para birokrat melakukan kinerja sesuai dengan fungsi dan jabatannya yang sudah di amanahkan oleh Aher sebagai kepala birokrasi. Sikap profesionalisme para birokrat harus dikedepankan agar tidak ada kinerja ataupun program kerja yang telah disusun dan ingin dicapai akan terealisasi dengan baik sesuai visi misi dari pemerintahan provinsi Jawa Barat. Jika para birokrat bekerja dengan profesional maka akan menciptakan birokrasi yang unggul atas kinerja para birokratnya.

Selain dituntut untuk profesional dalam bekerja para birokrat harus menjunjung tinggi sikap disiplin dalam bekerja. Kedisiplinan dalam bekerja tentunya sangat memberikan efek bagi kinerja yang dilakukan para birokrat. Disiplin dalam hal ini tidak sebatas mengenai kinerja namun juga disiplin dalam mengikuti aturan di dalam birokrasi. Sebagai kepala birokrasi seorang Aher memberikan *respect* kepada birokrat yang bisa disiplin dalam mengikuti aturan dan menjalankan kinerjanya. Sebuah birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat tidak akan berhasil jika para pengisi birokrasi tidak disiplin dalam kinerjanya.

Birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat yang diisi oleh birokrat yang menangani bidang-bidang yang berbeda dalam sebuah birokrasi tentunya akan memiliki tanggung jawab atas setiap bidang

yang didudukinya. Pengukuran kinerja yang selalu dilihat ialah ketika para birokrat bisa berdedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya. Pengorbanan dari tenaga, pikiran, dan waktu demi sebuah keberhasilan program kerja yang ingin dicapai. Perlunya kesadaran pada diri birokrat untuk menjadi seorang birokrat yang memiliki dedikasi yang tinggi agar memudahkan kinerja Aher sebagai kepala birokrasi pemerintahan. Perhatian yang lebih terhadap dedikasi para birokrat menjadikan seorang Aher harus memberikan motivasi kerja yang baik.

Keberhasilan sebuah birokrasi dapat terlihat dari motivasi kerja para birokratnya dalam menjalankan kinerja, sebuah kinerja akan cepat selesai jika dilandasi dengan semangat yang tinggi. Pemerintahan Aher yang menekankan atas kinerja membuat Aher melakukan inovasi yaitu pemberian tunjangan terhadap kinerja yang dilakukan oleh para birokrat. Melalui inovasi ini menjadikan motivasi kerja para birokrat menjadi tinggi dan memberikan kinerja maksimal demi tujuan yang akan dicapai.

Setelah adanya profesionalisme birokrat, kedisiplinan birokrat, dedikasi birokrat, dan motivasi kerja birokrat, yang tidak kalah pentingnya mengenai loyalitas para birokrat kepada Aher sebagai kepala birokrasi. Sebuah hubungan yang terjalin baik antara pemimpin dan yang dipimpin dapat didasari oleh loyalitas para birokrat kepada kepala birokasinya. Kesetiaan dan kepatuhan para birokrat akan menjadikan Aher tidak bekerja sendirian dalam menjalankan program kerja yang telah

disusunnya. Loyalitas kerja menjadi hal yang sangat penting karena birokrat yang loyalitasnya tinggi tidak ingin melihat pemimpinnya bekerja sendirian dalam menghadapi sebuah masalah dijalannya birokrasi pemerintahan.

Beberapa bidang seperti profesionalisme, kedisiplinan, dedikasi, motivasi, dan loyalitas yang perlu dibangun dengan baik didalam sebuah birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat. Jika sudah terciptanya empat bidang itu dengan baik maka akan mudah birokrasi pemerintahan menjalankan dan mencapai tujuan pada visi misi yang telah dibuat.

Pengelolaan dalam sebuah birokrasi pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar karena dalam mengelola birokrasi seorang kepala birokrasi harus bisa menjadi motivator dan innovator bagi seluruh birokrat yang mengisi birokrasi. Kewajiban menjalankan program kerja yang telah disusun menjadikan sebuah birokrasi memiliki tujuan yang ingin dicapai dan meraih keberhasilan.

Seorang kepala birokrasi tentunya tidak mudah dalam menjalankan program kerjanya karena banyaknya tantangan yang harus dilewati untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah disusun di program kerja yang ada. Kesiapan dan kegigihan seorang kepala birokrasi diharapkan bisa mengatasi segala tantangan yang muncul pada saat menjalankan kinerjanya. Memberikan kinerja secara maksimal merupakan kewajiban bagi seorang kepala birokrasi pemerintahan.

Pada masa kepemimpinan Aher di pemerintahan provinsi Jawa Barat periode 2013-2018 sekaligus melanjutkan kepemimpinannya di periode sebelumnya dan meneruskan program kerja yang belum terealisasi memotivasi ia untuk merealisasikan semua program kerja yang ada. Tentunya dalam merealisasikan sebuah program kerja tidak terlepas dari tantangan yang harus bisa dilewati. Adapun tantangan yang dihadapi Aher dalam memimpin birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

Pertama, tantangan sumber daya manusia, artinya pada birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat sumber daya manusianya harus terus dikembangkan agar para birokrat bisa berkerja secara profesional. Peningkatan sumber daya manusia tentunya sangat penting karena dengan memiliki sumber daya yang unggul akan membuat birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat bisa bersaing dengan birokrasi pemerintahan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi atas cepat atau lambatnya program kerja dari sebuah birokrasi terealisasi. Perlu adanya kesungguhan dari seorang Aher untuk bisa mengatasi tantangan mengenai peningkatan sumber daya manusia di dalam birokrasi yang dipimpinnya.

Kedua, tantangan komunikasi kepada birokrat, artinya sebuah komunikasi akan mempengaruhi keberhasilan sebuah birokrasi pemerintahan. Komunikasi dijadikan sebagai awal kedekatan kepala

birokrasi bersama para birokratnya dan dengan komunikasi para birokrat akan menjalankan visi misi gubernur. Penyusunan program kerja yang perlu dilakukan dengan adanya kontribusi dari semua elemen birokrasi agar tujuan yang terdapat di dalam program kerja adalah sebagai tujuan bersama yang ingin dicapai. Suatu masalah bisa timbul karena kurangnya komunikasi di dalam birokrasi sehingga komunikasi bisa dijadikan solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada pada birokrasi. Sebagai kepala birokrasi Aher yang menanamkan komunikasi sebagai awal kepemimpinannya harus bisa tetap menjaga komunikasi dengan para birokratnya dengan baik.

Ketiga, tantangan mengenai penguasaan teknologi para birokrat, artinya perkembangan teknologi yang saat ini lebih maju harus bisa dikuasai oleh para birokrat, karena penguasaan teknologi sangat penting dalam menjalankan sebuah birokrasi pemerintahan. Teknologi dijadikan sebagai sumber pengetahuan yang memudahkan penggunaannya untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Penguasaan teknologi dikalangan birokrat perlu ditingkatkan dengan adanya pelatihan-pelatihan dengan tujuan mempercepat terealisasinya sebuah program kerja. Sebagai kepala birokrasi seorang Aher harus bisa memfokuskan terhadap penguasaan teknologi bagi para birokratnya. Jika para birokrat menguasai teknologi tentunya akan mengembangkan inovasi di birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat.

Keempat, tantangan berupa tekanan dari pihak luar, artinya sebuah keniscayaan setiap kepemimpinan sebuah kepala birokrasi yang bisa memimpin organisasi dengan baik akan mengakibatkan banyaknya pihak yang kurang senang. Perlu adanya hubungan baik yang terjalin dengan pihak luar birokrasi agar tidak menimbulkan permasalahan dan berakibat kurang maksimalnya sebuah program kerja yang sedang dijalankan. Hubungan dengan pihak luar birokrasi harus di *upgrades* sendiri baik dalam urusan teknis maupun non teknis, dengan itu Aher sebagai kepala birokrasi akan bisa menyesuaikan kepemimpinan dengan kondisi di luar birokrasi pemerintahan. Ketercapaian program kerja perlu di dukung oleh pihak luar di birokrasi agar ketercapaian menjadi sebuah prestasi yang dibanggakan oleh semua pihak yang terlibat.

Sebagai seorang kepala birokrasi tentunya Aher memiliki kekurangan dalam kepemimpinannya di birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat. Menurut Hadisoemarto Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat “Salah satu kekurangan aher dalam hal penempatan pegawai atau promosi pegawai yang tidak disampaikan secara detail mengenai penempatan para pegawai”.⁵⁵

Sebuah birokrasi yang memiliki aturan tentunya harus adanya kejelasan dalam setiap penempatan birokrat yang sesuai kepada

⁵⁵ Sumarwan Hadisoemarto, wawancara dengan penulis, Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung, 27 November 2018.

kompetensi yang dimiliki oleh birokrat itu sendiri. Aher sebagai kepala birokrasi dalam menempatkan birokrat pada sebuah bidang di birokrasi pemerintahan tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai kebijakannya mengenai promosi birokrat yang menjadikan hal tersebut sebagai kekurangannya dalam memimpin birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat.

Sebuah pemerintahan yang baik harus dipimpin oleh pemimpin yang baik. Menurut Aher, seorang pemimpin pemerintahan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Pertama, sebagai pemimpin pemerintahan diperlukan integritas, ketulusan, dan keikhlasan dalam memimpin. Adanya integritas artinya seorang pemimpin harus memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran dalam memimpin sebuah birokrasi pemerintahan. Jika seorang pemimpin memiliki integritas yang baik maka birokrasi yang dipimpinnya akan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah adanya ketulusan artinya seorang pemimpin harus memiliki sifat tulus dalam bekerja sebagai seorang kepala birokrasi karena dengan ketulusan yang dilakukannya akan membuat kinerja yang dilakukan dengan sepenuh hati dan tidak ada kinerja yang dijalankan dengan setengah hati bahkan kinerja yang tidak selesai dengan baik. Terakhir ialah adanya keikhlasan artinya seorang pemimpin dalam menjalankan kinerjanya harus ikhlas terhadap tanggung jawab yang

dipegangnya. Keikhlasan dalam memimpin akan menjadikan seorang pemimpin birokrasi memberikan kinerja yang baik dan terfokus pada hasil kinerja yang dijalankan. Jika seorang pemimpin sudah ikhlas mengabdikan sebagai kepala birokrasi tentunya akan menciptakan birokrasi kondusif.

Kedua, sebagai pemimpin pemerintahan membutuhkan informasi. Adanya informasi yang diterima pemimpin birokrasi akan memudahkannya dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi pada birokrasi yang dipimpin. Pemimpin birokrasi dapat menerima informasi dari membaca situasi yang ada, mendengar aspirasi dari para birokrat maupun dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang ada di birokrasi. Melalui pemahaman terhadap informasi yang ada akan membuat pemimpin birokrasi mengetahui langkah yang akan dilakukan dalam menjaga birokrasi dari berbagai masalah yang timbul.

Ketiga, sebagai pemimpin pemerintahan memiliki fungsi manajemen. Artinya seorang pemimpin birokrasi dapat memimpin sebuah perencanaan, memimpin pengorganisasian program, memimpin pelaksanaan program, memimpin evaluasi dan monitoring program. Pemimpin birokrasi harus bisa memimpin sebuah perencanaan dalam mengelola birokrasi, perencanaan yang dimaksud ialah perencanaan mengenai program kerja yang akan dijalankan untuk jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Melalui perencanaan yang dibuat nantinya akan memberikan dasar yang kuat dalam sebuah program kerja.

Selain perencanaan, pemimpin birokrasi harus bisa memimpin pengorganisasian program maksudnya ialah pemimpin birokrasi sebagai pengendali dalam sebuah program dapat menyusun program kerja dengan baik yang berisi tujuan yang ingin dicapai. Adanya pengorganisasian program akan memudahkan program kerja tersebut terealisasi sesuai dengan visi misi pemerintahan. Selanjutnya pemimpin birokrasi harus bisa memimpin pelaksanaan program yang telah disusun, sebuah program akan terlaksana bergantung kepada kepemimpinan seorang pemimpin birokrasi karena jika pemimpin birokrasi bisa menjadi motivator sekaligus innovator dalam pelaksanaan sebuah program tentunya akan membuat para birokrat yang melaksanakan program kerja memberikan kinerja terbaiknya. Terakhir ialah pemimpin birokrasi harus bisa memimpin evaluasi dan monitoring program. Artinya sebagai pemimpin birokrasi bertugas mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan oleh birokrat agar mengetahui perkembangan program kerja yang sedang berjalan. Evaluasi yang dilakukan juga harus dibarengi dengan monitoring program yang bertahap agar program kerja tetap terpantau berjalan dengan baik dan dapat memperbaiki pelaksanaan program kerja yang kurang maksimal.

Berdasarkan pemaparan beberapa kriteria pemimpin pemerintahan yang diungkapkan oleh Aher, dapat dilihat besarnya pengaruh

kepemimpinan seorang pemimpin birokrasi dalam terealisasinya program kerja yang telah disusun demi kemajuan birokrasi pemerintahan.

B. Keberhasilan Kepemimpinan Ahmad Heryawan Di Provinsi Jawa Barat

1. Keberhasilan Sebagai Kepala Birokrasi

Sebuah pemerintahan akan berjalan dengan baik jika didasarkan pada kinerja dari semua elemen yang mengisi di birokrasi pemerintahan. Birokrasi merupakan suatu mesin politik yang melaksanakan kebijakan politik yang telah diambil atau dibuat oleh pejabat-pejabat politik.⁵⁶ Kinerja birokrat pemerintahan tentunya menjadi tolak ukur pada setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat akan terlihat jika pelayanan yang diberikan oleh birokrat pemerintahan maksimal dan terciptanya kesejahteraan di kalangan masyarakat.

Sebuah keberhasilan kepemimpinan di dalam organisasi atau birokrasi didapat dari mempelajari situasi baru yang dihadapi oleh seorang pemimpin birokrasi dan menyesuaikan teknik, perilaku dan gaya kepemimpinan dengan situasi nyata yang dihadapi.⁵⁷ Menurut Siagian, keberhasilan seorang pemimpin birokrasi dapat dilihat dari semua birokrat

⁵⁶ Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 21

⁵⁷ Sondang P Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 14

birokrasi bekerja dengan tingkat loyalitas dan disiplin yang tinggi, tidak ada konflik antar birokrat serta efisiensi, efektivitas dan produktivitas para birokrat berada pada tingkat maksimal.⁵⁸ Kepemimpinan adalah sebuah fungsi yang sangat menentukan bagi keberhasilan birokrasi.⁵⁹

Pada pemerintahan provinsi Jawa Barat periode 2013-2018 tepatnya pada masa kepemimpinan Aher di periode keduanya memimpin provinsi Jawa Barat menjadi sebuah pencapaian terbaik yang tingkat keberhasilannya signifikan. Menurut Hadisoemarto Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jawa Barat “kepemimpinan seorang Aher di lima tahun pertama meletakkan perencanaan dasar yang kuat dan pada kepemimpinan di periode 2013-2018 tingkat keberhasilannya sangat tinggi, seperti mendapat penghargaan yang diperoleh karena pemerintah yang berhasil”.⁶⁰

Keberhasilan yang dicapai Aher sebagai kepala birokrasi pemerintahan tentunya didukung oleh para birokrat yang bekerja dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai, maka perlu adanya komunikasi yang selalu terjaga dengan baik antara kepala birokrasi dengan para birokrat dibawahnya. Seorang Aher tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari para birokratnya dan begitupun birokrat pemerintahan Jawa

⁵⁸ *Ibid.*, h. 19

⁵⁹ Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 117

⁶⁰ Sumarwan Hadisoemarto, wawancara dengan penulis, Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung, 27 November 2018.

Barat tidak akan kerjadengan maksimal jika pemimpin birokrasinya tidak memimpin dengan benar.

Beberapa keberhasilan yang dicapai oleh Aher sebagai kepala birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintahan provinsi Jawa Barat sebagai birokrasi yang bersih

Pencapaian yang tentunya tidak mudah untuk diraih oleh seorang Aher sebagai kepala birokrasi pemerintah karena perlu adanya kerja keras yang dilakukan serta menciptakan inovasi brilian yang dampaknya signifikan dimasa depan khususnya dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan. Pemerintahan provinsi Jawa Barat yang dinobatkan sebagai salah satu birokrasi pemerintahan yang bersih yang ada di Indonesia tentunya tidak serta merta mudah untuk mendapatkan penilaian tersebut karena perlu adanya pencapaian kinerja yang baik dari setiap elemen yang mengisi di dalam birokrasi tersebut. Pemerintahan yang bersih tentunya dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat, bebas dari KKN yang dapat diukur berdasarkan integritas dan indeks persepsi korupsi masyarakat, dan akuntabilitas kinerja.

Pemerintahan yang bersih jika dilihat dari indeks kepuasan masyarakat tentunya dapat dinilai dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai penerima layanan tersebut. Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintahan provinsi Jawa Barat dalam hal ini Aher sebagai kepala birokrasi yang mengeluarkan kebijakan dan

memerintahkan kebijakan tersebut kepada para birokrat pemerintahan melalui komunikasinya yang non formal agar para birokrat dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Masyarakat yang menerima langsung pelayanan dari pemerintah tentunya dapat merasa nyaman dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan provinsi Jawa Barat seperti yang diutarakan oleh Nurhayati masyarakat kota Bandung provinsi Jawa Barat “dalam bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dan banyaknya kemajuan disegala bidang pada saat kepemimpinan Aher”.⁶¹ Banyaknya kemajuan disegala bidang di provinsi Jawa Barat tentunya membuat masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada saat kepemimpinan Aher, tentunya dalam hal ini didasarkan pada komunikasi yang dilakukan Aher kepada birokrat agar tulus dan memberikan kinerja semaksimal mungkin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat masyarakat.

Sebuah pemerintahan yang diharapkan maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tentunya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat provinsi Jawa Barat, walaupun dapat dikatakan hampir seluruh masyarakat puas terhadap kepemimpinan Aher ternyata masih ada masyarakat yang merasa belum sepenuhnya merasakan dampak besar dari

⁶¹ Dede Nurhayati, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 15 Mei 2019

kepemimpinan Aher. Seperti yang diutarakan oleh Moharom masyarakat kabupaten Ciamis provinsi Jawa Barat “pada beberapa sektor dalam pelayanan publik yang masih kurang dirasakan oleh masyarakat seperti pada bidang kesehatan seperti kebijakan penggunaan BPJS”.⁶² Bentuk sebuah pelayanan kepada masyarakat tentunya sangat diharapkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di provinsi Jawa Barat, namun terkadang ada kebijakan yang tidak 100% terealisasi sehingga berdampak pada kualitas pelayanan tersebut. Pelayanan kesehatan yang sangat diharapkan masyarakat berjalan lebih baik nyatanya masih kurang seperti kebijakan penggunaan BPJS, walaupun dapat dikatakan bahwa untuk BPJS bukan pemerintah provinsi yang langsung membuat kebijakan tetapi ada instansi lain diluar pemerintah provinsi. Namun seharusnya pemerintah provinsi dapat mengawasi jalannya pelaksanaan BPJS tersebut.

Pelayanan publik yang diberikan pemerintah provinsi Jawa Barat tentunya harus menyentuh seluruh masyarakat baik yang ada di kota maupun kabupaten. Tugas Aher dan para birokrat pemerintahannya untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di provinsi Jawa Barat. Masyarakat kabupaten yang sering merasakan belum ada dampak yang signifikan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah provinsi,

⁶² Mochammad Ilyas Moharom, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 16 Mei 2019

seperti yang diutarakan Dewi masyarakat kabupaten Ciamis provinsi Jawa Barat “untuk saat ini pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Jawa Barat sudah cukup baik, namun banyak kabupaten yang tingkat pelayanan publiknya masih kurang seperti pada pelayanan administrasi”.⁶³ Sudah menjadi tugas pemerintah provinsi Jawa Barat yang terdiri atas kota dan kabupaten bisa memberikan pelayanan publik dengan tingkat pelayanan yang sama dan menciptakan kesejahteraan serta kepuasan bagi masyarakat serta menghindari kecemburuan sosial dikalangan masyarakat yang tinggal di kabupaten kepada masyarakat yang tinggal di kota. Pelayanan administrasi yang diberikan pemerintah bagi masyarakat tentunya sangat penting karena akan memudahkan masyarakat yang khususnya tinggal di kabupaten mengurus urusan yang sifatnya administratif.

Pemerintah provinsi Jawa Barat yang dinobatkan sebagai pemerintahan yang bersih sudah sewajarnya harus melakukan perbaikan pelayanan di segala bidang yang ada seperti yang diutarakan Rizki mahasiswi IKIP Siliwangi di provinsi Jawa Barat “pelayanan publik yang masih belum maksimal yaitu seperti pelayanan dasar pada bidang pendidikan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena masih lemah perencanaan yang berdampak pada serapan anggaran

⁶³ Novianti Dewi, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 17 Mei 2019

yang kurang maksimal dan ketersediaan sarana prasarana”.⁶⁴ Pelayanan publik kepada masyarakat pada bidang pendidikan yang kurang maksimal tentunya berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena pendidikan menjadi program unggulan bagi setiap provinsi di Indonesia khususnya provinsi Jawa Barat. Melalui pelayanan yang baik kepada masyarakat akan menciptakan masyarakat bisa bersaing dalam lingkup Sumber Daya Manusia (SDM).

Bentuk pelayanan publik yang merata tentunya menjadi harapan seluruh masyarakat provinsi Jawa Barat. Kesejahteraan tentunya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berada di kota maupun di kabupaten. Hal inilah yang mendasari pentingnya komunikasi yang dilakukan Aher kepada birokrat pemerintahannya agar dapat menjangkau masyarakat yang ada di kabupaten. Seperti yang diutarakan oleh Sumirah masyarakat kabupaten Garut provinsi Jawa Barat “di daerah Jawa Barat yang hanya mendapat fasilitas pelayanan yang baik hanya pada kota Bandung sedangkan untuk masyarakat yang berada di kabupaten terutama kabupaten Garut masih sangat kurang”.⁶⁵ Sebuah keniscayaan bagi suatu kebijakan mengenai fasilitas pelayanan yang diberikan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk menciptakan kepuasan masyarakat karena

⁶⁴ Septi Nur Rizki, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 18 Mei 2019

⁶⁵ Susum Sumirah, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 19 Mei 2019

dengan adanya pelayanan yang merata akan berdampak baiknya persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pemaparan pada setiap penilaian masyarakat dalam hal ini mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat dapat dikatakan bahwa pelayanan publik yang diberikan pemerintah provinsi Jawa Barat sudah baik kepada masyarakat namun masih adanya bidang-bidang yang perlu diperbaiki seperti pada kesehatan dan pendidikan terutama yang berada di kabupaten. Pemerintah provinsi Jawa Barat harus memberikan pelayanan yang merata bagi masyarakat yang tinggal di kota dan kabupaten agar menciptakan masyarakat yang sejahtera.

b. Profesionalisme birokrat pemerintahan provinsi Jawa Barat

Profesionalisme para birokrat dalam sebuah kinerja dapat dilihat dari kedisiplinan dan produktivitas para birokrat dalam menjalankan kinerjanya. Adanya sikap profesionalisme dikalangan birokrat pemerintahan akan memudahkan Aher untuk merealisasikan setiap program kerja yang ingin dijalankan sesuai dengan visi misi Aher sebagai gubernur provinsi Jawa Barat. Cara yang digunakan Aher untuk membangun karakter birokrat harus dilakukan sejak awal melalui

pendekatan keagamaan dan kearifan lokal.⁶⁶ Setelah berjalannya program kerja yang ada tentunya Aher akan tetap menjaga sikap profesionalisme dari birokrat pemerintahannya. Ketika para birokrat menilai bahwa untuk kinerja menjadi sangat penting bagi kehidupannya maka para birokrat akan selalu menunjukkan kinerjanya.⁶⁷

a) Kedisiplinan Kerja Birokrat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Sebuah disiplin kerja sangat penting bagi birokrat, karena disiplin kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja birokrat. Oleh karena itu, birokrat merupakan motor penggerak utama selain gaya kepemimpinan pemimpin yang ada dalam birokrasi. Disiplin kerja yang baik merupakan cerminan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Disiplin kerja para birokrat pemerintahan Jawa Barat menjadi tolak ukur keberhasilan komunikasi yang dilakukan Aher kepada para birokrat sehingga menciptakan profesionalisme birokrat. Bentuk kedisiplinan yang terjadi didasarkan atas kepemimpinan Aher yang mengedepankan kepemimpinan non formal komunikasi yang

⁶⁶ Azis Zulkarnaen Handoyo, "Gubernur Jabar: Keagamaan dan Kearifan Lokal, Salah satu Faktor Membangun Karakter Aparatur" (On-line), tersedia di: http://m.rri.co.id/padang/post/berita/321961/daerah/gubernur_jabar_keagamaan_dan_kearifan_lokal_salah_satu_faktor_membangun_karakter_aparatur.html (02 Januari 2019)

⁶⁷ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 226

baik. Bentuk profesionalisme pada birokrat pemerintahan Provinsi Jawa Barat seperti yang diutarakan oleh Wirdani “semenjak kepemimpinan Aher kinerja para birokrat menjadi lebih baik karena kebijakan yang ia berikan kepada birokrat untuk berkerja 30 jam dalam seminggu, sehingga menciptakan disiplin dalam berkerja karena dapat dibuktikan dengan adanya finger print untuk para birokrat”.⁶⁸ Kedisiplinan yang ditanamkan Aher tentunya berdampak positif pada kinerja para birokrat karena dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan dan adanya *reward* bagi birokrat yang menunjukkan kinerja yang baik dan sifat disiplin atas tanggung jawab yang dibebani dapat menciptakan suasana kerja keras pada kinerja para birokrat dan dapat tumbuh secara masif dalam kehidupan birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat.

b) Produktivitas Kerja Birokrat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Produktivitas kerja menjadi salah faktor penting yang sangat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran sebuah birokrasi dalam proses pencapaian tujuannya. Pentingnya tingkat produktivitas kerja yang ditunjukkan birokrat dalam pencapaian tujuan birokrasi pemerintahan menunjukkan bahwa produktivitas kerja tidak bisa

⁶⁸ Erwin Wirdani, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 16 Mei 2019.

dibiarkan begitu saja akan tetapi harus diberi perhatian lebih oleh pemimpin birokrasi pemerintahan. Peningkatan produktivitas kerja birokrat dengan cara melakukan pengembangan birokrat, seperti perbaikan pelatihan dan pengetahuan kerja, kesehatann dan alokasi tugas.

Pada birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Aher sebagai kepala birokrasi harus menciptakan birokrat yang memiliki produktivitas kerja tinggi yang akan terciptanya kinerja yang baik dari setiap birokrat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dipegang. Aher yang menggunakan komunikasi non formal diharapkan dapat menciptakan birokrat yang memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Produktivitas kerja pada birokrat pemerintahan provinsi Jawa Barat terlihat seperti yang diutarakan Wirdani “produktivitas kinerja para birokrat tercapai karena adanya motivasi dari Aher untuk semua birokrat agar menyelesaikan setiap tugas yang diberikan pada hari itu juga dan sesuai dengan apa yang diperintahkan”.⁶⁹ Pernyataan ini dikuatkan oleh Hadisoemarto Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat “dalam menyusun konsep itu Aher memeriksa kata demi kata, sehingga membuat birokrat untuk harus selalu siap ketika menghadap beliau dan beliau

⁶⁹Erwin Wirdani, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 16 Mei 2019.

bukan hanya membangun yang formal saja informal pun ikut dibangun”.⁷⁰ Sebuah kinerja yang dituntut untuk selalu baik dan sesuai yang diperintahkan tentunya membuat para birokrat bisa memberikan kinerja yang semaksimal mungkin serta menghindari adanya kesalahan dalam berkerja. Atas dasar komunikasi Aher pada sebuah kebijakan dan perintah yang diberikan kepada birokrat inilah akan menciptakan produktivitas kerja yang baik pada para birokrat pemerintahan provinsi Jawa Barat.

c. Kenaikan pangkat berdasarkan rekam jejak kinerja

Salah satu keberhasilan Aher sebagai kepala birokrasi dapat dilihat dari kebijakan kenaikan pangkat pada birokrat. Aher menerapkan pendataan pada rekam jejak kinerja para birokrat artinya seorang birokrat akan mendapatkan kenaikan pangkat jika rekam jejak kinerjanya baik dan berprestasi sebaliknya seorang birokrat tidak akan mendapat kenaikan pangkat jika rekam jejak kinerjanya tidak ada prestasi yang dicapai oleh birokrat tersebut. Sebuah kebijakan seperti ini memberikan dampak yang positif bagi birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat karena para birokrat akan bekerja dengan penuh motivasi yang tinggi karena adanya kebijakan seperti ini. Sebagaimana yang diutarakan oleh Hadisoemarto

⁷⁰Sumarwan Hadisoemarto, wawancara dengan penulis, Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung, 27 November 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat “beliau (Aher) bisa membangun rasa kebersamaan berkarir, beliau menghargai seseorang bekerja, beliau menerapkan *reward and punishment* yang adil kepada birokrat. Adanya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yaitu pemberian intensif kepada pegawai dengan basis kinerja yang dilakukan, sehingga pendapatan yang didapatkan atas dasar kinerja yang dilakukan”.⁷¹

Cara yang dilakukan Aher untuk mengelola birokrasi yang menghasilkan keberhasilan yang sangat baik. Pemerintahan provinsi Jawa Barat membuat terobosan yang dilakukan, terobosan tersebut yaitu adanya tunjangan penghasilan pegawai artinya menghilangkan segala jenis honor dan diganti dengan tunjangan penghasilan pegawai berdasarkan jabatan, fungsi dan kerjanya. Merubah honor-honor kepegawaian berdasarkan jumlah proyek dan besaran anggaran proyek menjadi honor dibagikan berdasarkan kinerja. Pegawai yang berkerja dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing. Birokrat yang berkerja dengan baik itu yang akan mendapat honor. Melalui cara seperti ini pegawai akan meningkatkan kinerja pegawai sehingga setiap pekerjaan akan tuntas dengan baik agar kinerjanya tercapai 100% atau mendekati 100%. Tidak ada tunjangan tanpa kinerja yang dilakukan sehingga dampaknya tidak ada

⁷¹Sumarwan Hadisoemarto, wawancara dengan penulis, Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung, 27 November 2018.

diskriminasi pada pegawai yang berkerja di kedinasan karena mendapat tunjangan penghasilan pegawai berdasarkan kinerja.

Kebijakan yang dilakukan oleh Aher sebagai kepala birokrasi pemerintahan tentunya akan menciptakan suasana kompetisi di kalangan birokrat, mereka akan berkompetisi menunjukkan kinerja terbaik mereka dan akan mengedepankan kedisiplinan yang dibarengi oleh proses kinerja yang baik hingga menghasilkan kinerja yang memuaskan serta berdampak positif kepada keberhasilan di dalam birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat. Efisiensi dan kinerja birokrasi yang tinggi dapat dicapai bila pemimpin berperan secara efektif dalam mengkordinasikan semua bawahan di lingkungan birokrasi.⁷² Hal inilah yang menjadikan birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat menjadi percontohan bagi pemerintahan provinsi lainnya yang ada di Indonesia.

Seorang Aher sebagai manajemen dalam birokrasi pemerintahan harus melakukan usaha kooperatif mencapai tujuan atau sasaran bersama yang dibantu oleh macam-macam sumber dan sarana. Berlangsunglah satu kerja sama yang disertai kegiatan memimpin dan dipimpin, ketertiban, pengaturan atau regulasi, pembagian tugas pekerjaan, dan tata kerja yang teratur.⁷³ Dapat dilihat bahwasanya sebuah kepemimpinan yang baik maka harus diiringi dengan pemimpin yang baik dalam mengelola birokrasinya

⁷² Harbani Passolong, *Kepemimpinan Birokrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 32

⁷³ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal itu?*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 121

dan harus cermat melihat situasi yang terjadi di dalam birokrasi tersebut. Menurut Hadisoemarto Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat “Salah satu keberhasilan beliau (Aher) adalah beliau total dan detail dalam suatu program”.⁷⁴

Atas dasar total dan detail dalam suatu program yang diterapkan dalam kepemimpinannya membuat ia lebih paham terhadap sebuah konsep yang ingin sedang disusun ataupun konsep yang sudah disusun dan ingin dijalankan. Perlu adanya kerja sama yang kuat dalam proses ini karena Aher harus bisa mengajarkan mengenai penyusunan konsep yang benar dalam hal kinerja di birokrasi pemerintahan. Bagi para birokrat hal ini akan membawa dampak yang positif bagi kinerjanya karena birokrat akan terbiasa bekerja dengan total dan detail dalam sebuah program yang ingin dicapai. Inilah sebuah keberhasilan Aher sebagai kepala birokrasi yang selalu menjalin komunikasi kepada birokratnya tanpa ada batasan dan tidak kaku dalam menjalankan setiap kerja sama antara yang memimpin dan yang dipimpin.

Komunikasi yang dilakukan Aher kepada para birokrat terlihat berhasil ketika dilihat dari pencapaian yang telah didapat seperti yang diutarakan oleh Aher yaitu “Pencapaian terbaik di birokrasi pemerintahan pertumbuhan perekonomian Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) dari 16

⁷⁴Sumarwan Hadisoemarto, wawancara dengan penulis, Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung, 27 November 2018.

ke 10, di birokrasi pencapaian terbaiknya adalah ada pada pencapaian tertinggi diberbagai bidang seperti dibidang keuangan tujuh kali berturut turut mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bidang akuntabilitas kinerja mendapat A, kesesuaian program dan kinerja dan hasil serta efektif dan efisien kinerja mendapat A, dan terbaik tiga kali berturut turut dari 2014, 2015, 2016 dari hasil ini Jawa Barat diberi Satya Lencana dan diberi penghargaan tertinggi dari presiden yaitu Parasamya Purnakarya Nugraha diberikan kepada provinsi, kabupaten/kota yang memiliki kinerja yang baik”.⁷⁵

Pencapaian yang didapat oleh Aher dalam memimpin birokrasi pemerintahan Jawa Barat tentunya didasarkan atas kedekatan Aher kepada para birokratnya yang menciptakan rasa kekeluargaan yang erat dan tidak adanya batasan antara atasan dan bawahan. Melalui kedekatan ini tentunya setiap kinerja yang dijalankan akan baik dalam prosesnya serta hasil kinerja akan memuaskan. Bukti pencapaian inilah yang menghantarkan seorang Aher menjadi salah satu pemimpin yang berprestasi walaupun prestasi yang didapatkannya jarang diketahui oleh banyak masyarakat luas karena Aher terkenal dengan sebutan pemimpin yang bekerja dalam hening.

⁷⁵ Ahmad Heryawan, wawancara dengan penulis, Geulis Boutique Hotel dan Café, Bandung, 27 November 2018.

2. Penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Keberhasilan seorang pemimpin tentunya dapat dilihat dari pencapaian yang telah dicapai. Bentuk apresiasi terhadap pencapaian yang telah dicapai oleh seorang kepala birokrasi pemerintahan berbentuk sebuah penghargaan yang didapatkannya baik yang diberikan untuk pribadi pemimpin tersebut atau penghargaan yang diberikan untuk organisasi yang dipimpin. Bukti keberhasilan seorang pemimpin yang memimpin sebuah lembaga pemerintahan ialah ketika ia bisa memberikan kontribusi yang signifikan dan keberhasilan tersebut diakui oleh Negara. Pemimpin dapat menjadi sukses dan tidak efektif, hanya mempunyai pengaruh yang kecil terhadap perilaku orang lain. Sebaliknya, apabila pemimpin sukses dan sekaligus efektif, pengaruhnya cenderung membuahkan hasil yang berlaku lama dan dapat digunakan untuk mengembangkan organisasi.⁷⁶

Kepemimpinan yang telah dijalankan oleh seorang Aher di Provinsi Jawa Barat selama dua periode menghasilkan banyak penghargaan yang didapatkan baik dalam kategori Aher sebagai kepala daerah maupun sebagai kepala birokrasi pemerintahan. Tentunya kinerja yang telah dijalankan oleh Aher tidak serta merta mudah untuk mendapatkan

⁷⁶ Miftah Thoah, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.

penghargaan dari Negara, perlu adanya kerja sama antara Aher dan para birokrat pemerintahan Jawa Barat untuk mencapai visi misi yang ingin dicapai.

Pada kepemimpinan Aher periode tahun 2013-2018 birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat dalam kategori birokrasi dengan kinerja terbaik dan dapat menjadi percontohan. Adapun beberapa penghargaan tersebut, yaitu:

a. **Innovative Government Award 2017 (Penghargaan Pemerintah Daerah yang Inovatif)**

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Tjahyo Kumolo, penghargaan ini diberikan atas dasar daerah Jawa Barat mempunyai inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai birokrasi yang dipimpin oleh Aher selalu berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik sebaik mungkin karena dengan pelayanan publik yang baik akan menciptakan kenyamanan bekerja para birokrat dan terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat. Birokrasi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional. Pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi

aparatur Negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi Negara.⁷⁷

Sebuah pencapaian yang diperoleh oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang melekat pada diri Aher, sebuah gaya kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh Aher yaitu kepemimpinan yang berusaha untuk melibatkan, mengikutsertakan, memberdayakan semua birokrat pemerintahan di dalam mendukung peran dan tanggung jawab ia sebagai seorang pemimpin birokrasi. Sebagai pemimpin yang partisipatif ia selalu bekerjasama dengan birokrat dan ia akan merasa tidak akan sukses jika tidak melibatkan birokratnya dalam memimpin. Melihat hal ini tidak dapat dipungkiri kunci suksesnya Aher dalam memimpin ialah karena kedekatan ia dengan para birokrat pemerintahan provinsi Jawa Barat.

b. Parasamya Purnakarya Nugraha

Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan atas dasar keberhasilan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan ini atas dasar menjadi pemerintah provinsi dengan kinerja tertinggi nasional selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2014, 2015, dan 2016.

⁷⁷ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 143

Parasamya Purnakarya diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (LPPD) kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang telah berhasil mencapai peringkat tiga besar berturut-turut secara nasional. Berikut ini rinciannya yaitu peringkat ketiga atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2014, peringkat kedua pada tahun 2015, serta peringkat kedua pada tahun 2016. Penyerahan penghargaan ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.



BAB V PENUTUP

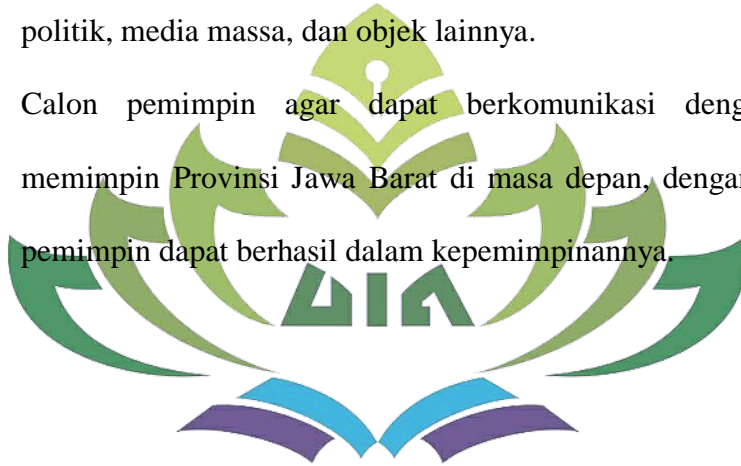
A. Kesimpulan

1. Komunikasi politik yang dilakukan Aher dalam keberhasilan kepemimpinannya di Jawa Barat ialah beliau menggunakan komunikasi non formal antara kepala birokrasi dan para birokrat, menggunakan kepemimpinan partisipatif dalam memimpin birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat, menggunakan acara keagamaan berbentuk pengajian sebagai media komunikasi dengan birokrat.
2. Keberhasilan kepemimpinan Aher sebagai kepala birokrasi pemerintahan provinsi Jawa Barat pada periode 2013-2018 ialah dinobatkannya pemerintahan provinsi Jawa Barat masuk dalam birokrasi yang bersih, kecakapan dan profesionalisme para birokrat dapat diandalkan yang dapat dilihat dari kedisiplinan dan produktivitas kerja, membangun birokrasi dengan rekam jejak seseorang. Mendapat penghargaan birokrasi dengan penataan pemerintahan dengan baik. Pencapaian terbaik yang diraih oleh birokrasi pencapaian terbaiknya adalah ada pada pencapaian tertinggi diberbagai bidang seperti dibidang keuangan tujuh kali berturut turut mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bidang akuntabilitas kinerja mendapat A, kesesuaian program dan kinerja dan hasil serta efektif dan efisien kinerja mendapat A, dan terbaik tiga kali berturut turut dari 2014,

2015, 2016 dari hasil ini Jawa Barat diberi Satya Lencana dan diberi penghargaan tertinggi dari presiden yaitu Parasamya Purnakarya Nugraha.

B. Rekomendasi

1. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, untuk melakukan penelitian mengenai komunikasi politik tidak hanya yang dilakukan oleh seorang pemimpin, tetapi juga dilakukan oleh partai politik, media massa, dan objek lainnya.
2. Calon pemimpin agar dapat berkomunikasi dengan baik dalam memimpin Provinsi Jawa Barat di masa depan, dengan demikian calon pemimpin dapat berhasil dalam kepemimpinannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat 2016-2020*, Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2016.

Basah, Ranting, dkk, *Aherundercover: Menyikap Sisi Lain Ahmad Heryawan*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017/2018.

Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

-----, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Cribbin, James J., *Kepemimpinan Strategi Mengefektifkan Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia, 1990.

Danim, Sudarwan, *Motivasi, Kepemimpinan, dan Efektivitas Kelompok*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: AlQur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Dwiyanto, Agus, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitiandan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Researh Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.

Heryanto, Gun Gun dan Shulhan Rumar, *Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

-----, *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media Di Panggung Politik*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.

Heryawan, Ahmad, *Membangun Peradaban Mulia*, Jakarta: Emir, 2016.

Himat, Mahi M., *Komunikasi Politik Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.

Indraku, dkk, *Aherlicious: Inspirasi Penuh Hikmah dari Kisah Renyah Ahmad Heryawan*, Bekasi: Duta Media Tama, 2015.

Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhammad, Arni, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Nawawi, Zaidan, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Passolong, Harbani, *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Rohim, Syaiful, *Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam, dan Aplikasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Siagian, Sondang P., *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Subiakto, Henry dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Syafrudin, Ateng, *Kapita Selekta: Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Tambunan, Toman Sony, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Jakarta: Kencana, 2014.

-----, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2011.

Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wusanto, *Etika Komunikasi Kantor*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Wawancara:

Ahmad Heryawan, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Bandung, 27 November 2018.

Dede Nurhayati, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 15 Mei 2019.

Erwin Wirdani, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 16 Mei 2019.

Mochammad Ilyas Moharom, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 16 Mei 2019.

Novianti Dewi, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 17 Mei 2019.

Septi Nur Rizki, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 18 Mei 2019.

Sumarwan Hadisoemarto, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Bandung, 27 November 2018.

Susum Sumirah, wawancara dengan penulis, via telepon, Bandar Lampung, 19 Mei 2019.

Sumberon-line:

Azis Zulkarnaen Handoyo, “Gubernur Jabar: Keagamaan dan Kearifan Lokal, Salah satu Faktor Membangun Karakter Aparatur” (On-line), tersedia di: http://m.rri.co.id/padang/post/berita/321961/daerah/gubernur_jabar_keagamaan_dan_kearifan_lokal_salah_satu_faktor_membangun_karakter_aparatur.html/ (02 Januari 2019)

“Aher Berbagi Keberhasilan Pembangunan Jabar Dengan Mahasiswa Jambi” (On-line), tersedia di: <https://jabar.antaranews.com/berita/68495/aher-berbagi-keberhasilan-pembangunan-jabar-dengan-mahasiswa-jambi/> (19 Mei 2018).

“Ahmad Heryawan Politisi Indonesia” (On-Line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Heryawan/ (13 Desember 2018).

“Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat” (On-line), tersedia di: <http://jabarprov.go.id/infografis/> (08 Desember 2018).

“Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat” (On-line), tersedia di: <http://jabarprov.go.id/index.php/id/1352> (08 Desember 2018).





Gambar 1. Wawancara bersama Aher



Gambar 2. Wawancara bersama Aher



Gambar 3. Bersama Sumarwan Hadi Soemarto



Gambar 4. Penghargaan yang diraih Provinsi Jawa Barat